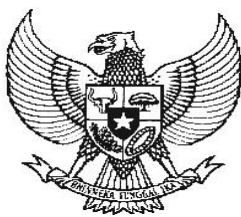




RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2010



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
2009



**PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA
TAHUN 2010**



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
2009**



**PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK)
PIDIE JAYA TAHUN 2010**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah yang dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2010 (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten tentang APBK.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK Pidie Jaya Tahun 2010 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2010 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPK Pidie Jaya Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tahun 2010 dan bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2010.

Pasal 4

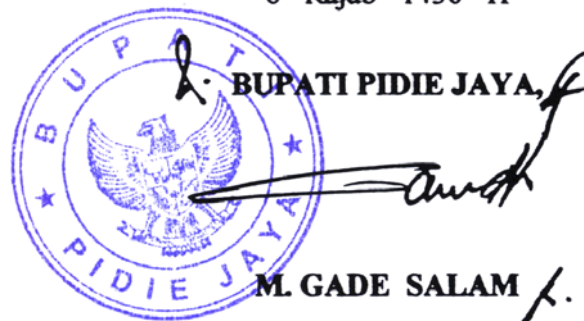
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Juni 2009 M
6 Rajab 1430 H



Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 29 Juni 2009 M
6 Rajab 1430 H

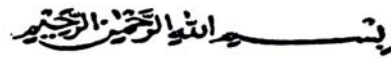
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RAMLI DAUD', written over a horizontal line.

RAMLI DAUD

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK)
PIDIE JAYA TAHUN 2010**

KATA PENGANTAR




Segala puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan "Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010". Penyusunan RKPK Pidie Jaya Tahun 2010 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPK Pidie Jaya Tahun 2010 ini disusun dengan tujuan mewujudkan sinergisitas pada tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan terbagi kedalam perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 29 Juni 2009
6 Rajab 1430

dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah Kabupaten atau seperti yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam kerangka pembangunan daerah, RKPK merupakan hal yang sangat penting, karena akan berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana.

Kami menyadari penulisan Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2010, masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan dari semua pihak yang berkepentingan untuk perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pidie Jaya.


BUPATI PIDIE JAYA
M. GADE SALAM
M. GADE SALAM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan tujuan	I-4
1.3 Landasan Hukum	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2008	II-1
2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah	II-1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun lalu dan Realisasi RPJM	II-5
2.3 Isu Strategis dan Masalah Mendesak	II-8
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1 Kondisi ekonomi daerah tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009	III-1
3.2 Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2010 dan 2011	III-8
3.3 Arah kebijakan ekonomi daerah	III-10
3.4 Arah kebijakan keuangan daerah	III-13
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010	IV-1
4.1 Prioritas pembangunan daerah	IV-1
4.2 Sasaran pembangunan daerah	IV-16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 29 Juni 2009
6 Rajab 1430

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH TAHUN 2010..... V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007-2009 II-2
Tabel 2.2	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007-2009 II-3
Tabel 2.3	Perkembangan Total Dana Perimbangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007-2009 II-4
Tabel 3.1	PDRB Per-kapita dan Pendapatan Regional Per-kapita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000 – 2007 atas Dasar Harga Konstan 2000 III-3
Tabel 3.2	PDRB Per-kapita dan Pendapatan Regional Per-kapita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000 – 2007 atas Dasar Harga Berlaku III-4

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik	2.1	Perkembangan APBK Pidie Jaya Tahun 2007 – 2009	III-2
Grafik	2.2	Perkembangan PAD Pidie Jaya Tahun 2007 – 2009	III-3
Grafik	2.3	Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 – 2009	III-5
Grafik	3.1	PDRB Per-kapita dan Pendapatan Regional Per-kapita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000 – 2007 atas Dasar Harga Konstan	II-4
Grafik	3.2	PDRB Per-kapita dan Pendapatan Regional Per-kapita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000 – 2007 atas Dasar Harga Berlaku	II-5
Grafik	3.3	Kontribusi Sektor terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2000, Tahun 2000 – 2007 (persen)	II-6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Proses pelaksanaan pembangunan nasional dituntut untuk dapat memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan secara umum adalah mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat, walaupun pada proses pelaksanaannya sering kali berbagai kegiatan pembangunan tersebut membawa kecenderungan ke arah yang relatif tidak tepat. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan, diperlukan suatu perencanaan yang matang, agar berbagai kegiatan pembangunan dapat diarahkan secara menyeluruh dan terpadu kepada tujuan serta tepat sasaran seperti yang diharapkan. Selain dari itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara terencana akan sangat membantu dalam hal pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan pembangunan, maka rumusan perencanaan pembangunan harus dikonsepsikan secara terpadu dan merata agar berbagai kegiatan pembangunan tetap relevan dengan tujuan pembangunan.

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka mempercepat peningkatan



kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah dilaksanakan oleh pemerintah melalui anggaran pembangunan dan belanja, baik yang berasal dari APBN, APBA, APBK, Otsus dan Tambahan Bagi Hasil Migas serta dari pendanaan lainnya. Disamping itu pembangunan juga melibatkan partisipasi berbagai *stakeholder's*, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka menggali dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang sangat penting dari proses penentuan suatu kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Terkait dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa, SPPN merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.

Keseluruhan aspirasi yang disampaikan oleh *stakeholder's* dimuat dalam dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Dalam kerangka pembangunan daerah, RKPK merupakan hal yang sangat penting, karena akan berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana.

Penyusunan RKPK Pidie Jaya untuk tahun 2010 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009-2014. Sebagai kabupaten baru, Kabupaten Pidie Jaya masih banyak menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menyiasati proses pembangunan agar tetap sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009-2014 dan RPJM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada tahun 2010, Kabupaten Pidie Jaya diperkirakan masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, penduduk miskin, pengangguran, ketahanan pangan, pelayanan infrastruktur wilayah, kerentanan terhadap bencana alam dan kerusakan lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang, jumlah penduduk serta optimalisasi kinerja pemerintah daerah.

Dengan adanya tantangan tersebut, maka perlu direformulasikan kembali isu strategis dan prioritas rencana pembangunan yang baru.



Upaya reformulasi ini sangat penting, selain untuk tetap sesuai dengan arah pembangunan daerah, juga untuk mendorong agar kebijakan yang direncanakan pada tahun 2010 tetap mengarah kepada pencapaian visi, misi dan target yang ditetapkan Daerah (mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009-2014). Selain dari itu untuk mewujudkan sinergisitas dan akselerasi pencapaian prioritas pembangunan, telah dirumuskan pula tujuan bersama (*common goals*) yang terjadi komitmen semua pihak serta pelibatan secara aktif lintas SKPD dan para pelaku pembangunan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka perwujudan issue strategis dan pencapaian tujuan pembangunan untuk tahun pertama RPJM Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014 dengan kebijakan prioritas pembangunan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal yang berkualitas
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
- 3) Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat
- 4) Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komoditi unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan



- 5) Pembinaan wawasan keislaman dan pelaksanaan syariat islam secara berkelanjutan dan berkeadilan serta pembangunan sosial budaya.
- 6) Penguatan kelembagaan Pemerintah yang berbasis teknologi, Politik dan hukum

Keenam prioritas pembangunan di atas merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan saling terkait satu dengan yang lainnya dalam rangka mewujudkan perubahan yang fundamental di segala bidang ke arah yang lebih baik. RKPK Tahun 2010 yang sinergi dan terarah diupayakan dapat membangun dalam peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, pembangunan infrastruktur, Layanan kesehatan, penanganan pengangguran dan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan pemerintahan yang bersih.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya tahun 2010 dimaksud adalah untuk menjadi acuan dan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya, baik yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, Otsus dan Tambahan Bagi Hasil Migas maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar



wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3. Landasan Hukum

Landasan yuridis yang mendasari penyusunan RKPK Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara RI Nomor 104 Tahun 2004).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463).
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



13. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12).

1.4. Sistematika Penyusunan RKPK

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 dengan mengacu kepada sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, Landasan Hukum maksud dan tujuan, dan Sistematika Penyusunan RKPD

Bab II Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RKPD Tahun 2008

Pada Bab ini akan diuraikan tentang evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah, Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJM, dan isu strategis dan masalah mendesak.

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan,

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai kondisi ekonomi daerah tahun 2008 dan tahun 2009, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2010 dan 2011,



arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2010,

Pada Bab ini diuraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu, penetapan pagu indikatif dengan mengacu kepada SKPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Pada Bab ini diuraikan tentang perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi dan SKPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan program dan kegiatan prioritas

Bab VI Penutup

Pada Bab ini menguraikan berbagai dampak program dan rekomendasi terhadap penentuan kebijakan pembangunan.



BAB II

EVALUASI HASIL KINERJA PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2008

2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Pencapaian Kinerja pembangunan daerah merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran kinerja ini meliputi perkembangan indikator makro pembangunan yang diimplementasikan dari program pembangunan dan sumber daya keuangan yang direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Pidie Jaya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan sumber keuangan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah. Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, sedangkan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yaitu selisih



antara pendapatan dan belanja, yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.

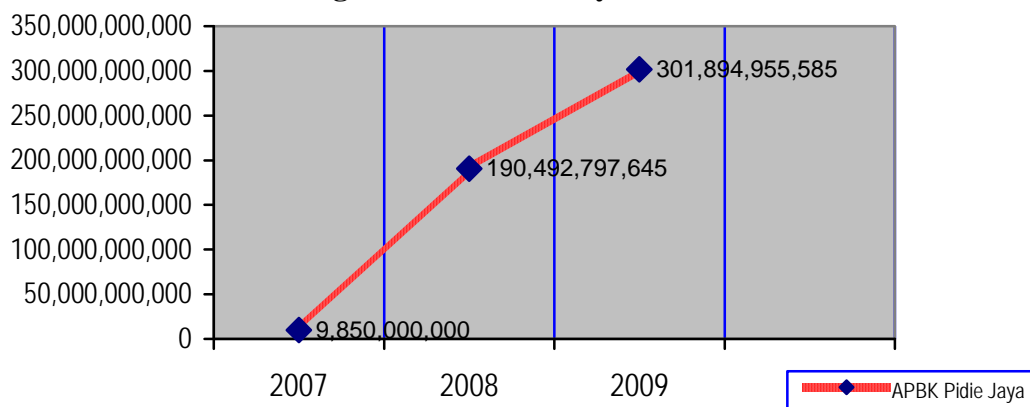
Perkembangan APBK selama kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009, terus menunjukkan peningkatan seiring dengan semakin besarnya kebutuhan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, kondisi tersebut terjadi karena mulai Tahun 2008 Kabupaten Pidie Jaya sudah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri serta sumber pendapatan lainnya. Gambaran lengkap perkembangan APBK Pidie Jaya Tahun 2007 sampai dengan 2009 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Pidie Jaya
Tahun 2007 - 2009

Tahun	Volume APBK (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2007	9.850.000.000	-	Hibah
2008	190.492.797.645	1.833,94	
2009	301.894.955.585	58,48	

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pidie Jaya (diolah)

Grafik 2.1
Perkembangan APBK Pidie Jaya Tahun 2007-2009





Secara total pendapatan Kabupaten Pidie Jaya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.359.112.880 atau 85,66 % dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 2.347.883.600, hal ini dikarenakan mulai Tahun 2008 Kabupaten Pidie Jaya sudah mempunyai pendapatan dan anggaran sendiri.

Tabel 2.2

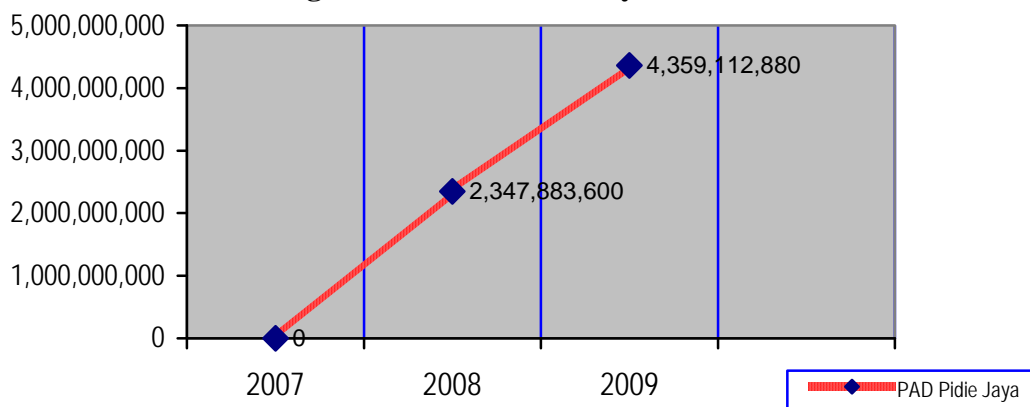
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 - 2009

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2007	0	0 %	Hibah Kab. Pidie
2008	2.347.883.600	100 %	
2009	4.359.112.880	85,66 %	

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pidie Jaya (diolah)

Grafik 2.2

Perkembangan PAD Kab. Pidie Jaya Tahun 2007-2009





Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka salah satu jenis sumber penerimaan daerah adalah berasal dari dana perimbangan. Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dari Dana Perimbangan masih relatif cukup besar yang dapat dilihat dari kontribusi dana perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus berusaha untuk mengembangkan diri, sehingga kedudukannya minimal dapat sejajar dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Total penerimaan dari Dana Perimbangan baik dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 165.237.299.434 meningkat pada Tahun 2009 menjadi Rp. 286.499.839.343 atau 73,39 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

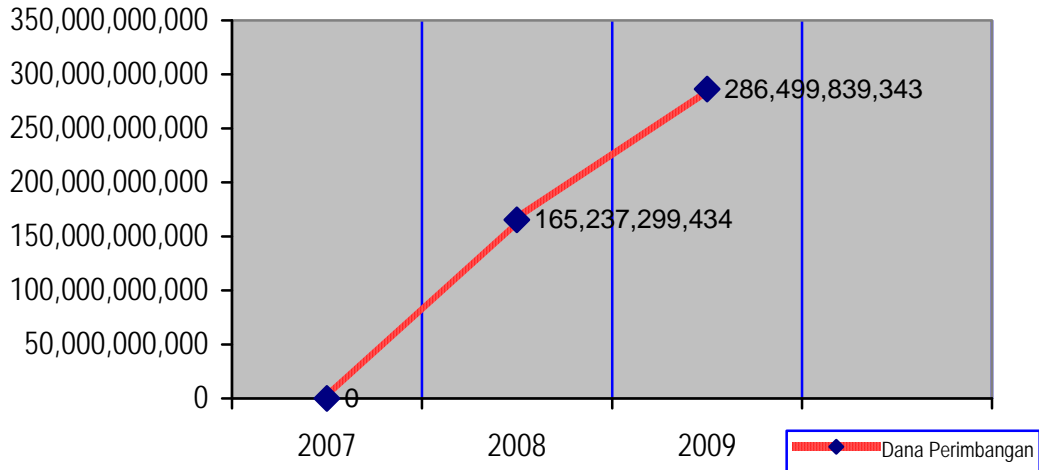
Tabel 2.3
Perkembangan Total Dana Perimbangan Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2007 – 2009

Tahun	Perimbangan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2007	0	0 %
2008	165.237.299.434	100 %
2009	286.499.839.343	73,39 %

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pidie Jaya (diolah)



Grafik 3.3
Perkembangan Dana Perimbangan Kab. Pidie Jaya
Tahun 2007-2009



2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun Lalu dan Realisasi RPJM

Secara umum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target kinerja dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2008. Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan terindikasi bahwa hanya 5 indikator hasil (2,50 %) yang kurang berhasil dilaksanakan. Penyebab kurang berhasilnya pelaksanaan kegiatan ini antara lain karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta kurangnya jumlah dan kompetensi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Disamping itu juga terdapat beberapa kegiatan yang saling terkait sehingga kegagalan kegiatan yang satu menyebabkan gagalnya kegiatan yang lain. Beberapa upaya yang telah dan akan terus dilakukan adalah



meningkatkan koordinasi, sinkronisasi antar perangkat daerah dan pihak-pihak lain yang terkait.

Dengan demikian sebagian besar kegiatan (90,00 %) mampu direalisasikan dengan baik yang terindikasi dari kinerja outcomes mencapai 100 %. Capaian kinerja inilah yang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan. Dari 84 target kinerja indikator sasaran yang ditetapkan pada tahun 2008, hampir seluruhnya, yakni 73 target kinerja indikator sasaran (86,90%) berhasil direalisasikan diatas 85%. Sedangkan 11 target kinerja indikator sasaran (13,10%).

Meskipun demikian harus diakui bahwa masih ada program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2008 tidak terlaksana secara optimal. Banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya tingkat pencapaian kinerja ini, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang tentunya untuk mengatasinya memerlukan proses waktu, sarana dan prasarana serta jumlah dan kemampuan pegawai yang cukup dan terus lebih ditingkatkan.

Sedangkan faktor eksternal berupa stabilitas politik daerah yang relatif kurang stabil dan peran serta masyarakat dirasakan masih relatif kurang, kebijakan Pemerintah Pusat yang mempunyai implikasi terhadap iklim kerja pegawai yang kurang menguntungkan. Faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap belum optimalnya kinerja ini adalah karena



kurang sinerginya kegiatan, program dan kebijakan antar perangkat daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antar unit/organisasi terkait untuk mensinergikan berbagai kegiatan, program dan kebijakan.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur.
3. Membangun iklim kerja yang kondusif di semua tingkatan organisasi.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014 adalah :

" Mewujudkan Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat "

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014 ditetapkan 5 (lima) Misi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yaitu :

1. Membangun dan memperbaiki kredibilitas, kapasitas manajemen dan kinerja aparatur Pemerintah Daerah.



2. Mengaktualisasikan kembali potensi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dengan semangat kebersamaan.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama masyarakat bekerja disektor perkebunan, pertanian dan nelayan.
4. Menumbuhkan kembali nilai-nilai islamiah dan perumusan kebijakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
5. Memfasilitasi penyediaan modal usaha bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Mencermati berbagai perkembangan pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, diperlukan upaya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkannya. Hal tersebut sangatlah penting apabila dikaitkan dengan pencapaian target indikator makro pembangunan yang relatif masih kurang memenuhi target. Untuk itu pencapaian target pembangunan, masih perlu dioptimalisasikan dalam implementasinya. Berbagai upaya akan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2010, dimana harapannya akan lebih fokus pada program maupun kegiatan yang telah direncanakan dan akan dicapai sesuai target dimaksud.



Perkembangan Indikator Kabupaten Pidie Jaya sebagai representasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian Indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tiga komponen saja yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli, akan tetapi sesungguhnya dipengaruhi pula oleh semua bidang pembangunan, baik yang terkait secara langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun yang dianggap sebagai penunjang. Disamping itu, keberhasilan pencapaian Indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program maupun kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten, akan tetapi dipengaruhi oleh semua program maupun kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh berbagai level pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu, perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Pidie Jaya dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Pidie Jaya secara umum selama kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan 2009, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010. Disamping itu, hal lain yang dijadikan sebagai dasar rujukan penentuan isu strategis adalah masalah terkini yang terjadi dalam skala nasional, skala provinsi, hasil Musrenbang Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009 dan hasil forum Satuan Kerja Perangkat Daerah serta



tuntutan dan kebutuhan riil yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

Dewasa ini, isu-isu strategis yang berkembang di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pendidikan.
2. Rendahnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan.
3. Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi.
4. Tingkat pengangguran masih relatif tinggi terutama pada level penduduk usia kerja.
5. Pemberdayaan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan pengembangan daerah relatif belum berjalan secara optimal.
6. Pelayanan dan ketersediaan infrastruktur wilayah yang dapat mengakses sentra produksi belum tersedia secara maksimal.
7. Kinerja aparatur pemerintahan relatif belum optimal.
8. Pengamalan syariat islam dan pembinaan Dayah/Pesantren belum maksimal.

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2010 merupakan *Out put* dari proses perencanaan di atas, yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya.

Perencanaan pembangunan pada hakikatnya merupakan pengalokasian sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber



ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih berhasil guna dan berdaya guna. RKPK Kabupaten Pidie Jaya tahun 2010 ditetapkan Prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Perekonomian merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah.

Stabilitas ekonomi makro adalah salah satu prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable growth*). Upaya-upaya untuk menjamin stabilitas ekonomi makro dilakukan melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul baik dari dalam maupun dari luar daerah.

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang optimal maka kebijakan utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengusahakan agar prioritas pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Dengan demikian



pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah merupakan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, potensi ekonomi sektor unggulan daerah perlu mendapat perhatian yang serius dengan melihat keunggulan dari masing-masing sektor ekonomi yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat dan berkembang secara optimal.

Pembangunan daerah pada umumnya difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui upaya memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada dalam masyarakat dengan prioritas pada sektor unggulan daerah. Tujuan dari upaya tersebut adalah terciptanya roda perekonomian masyarakat yang pada akhirnya tercipta peningkatan produksi barang dan jasa. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro, antara lain nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi, struktur dan laju pertumbuhan, distribusi pendapatan dan sebagainya. Semua indikator makro tersebut terhimpun dan dapat dianalisa melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam periode tertentu. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) akumulasi modal, (2) pertumbuhan penduduk, dan (3) kemajuan teknologi. Suatu perekonomian dikatakan



mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pada pencapaian pada periode sebelumnya.

Tabel 3.1
PDRB Per-Kapita dan Pendapatan Regional Per-Kapita
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000-2007

Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tahun	PDRB Per Kapita		Pendapatan Regional Per Kapita	
	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (rupiah)	Pertumbuhan (%)
2000	3.308.896,40	-	3.132.185,12	-
2001	3.351.852,15	1,30	3.171.392,29	1,25
2002	3.399.014,33	1,41	3.216.730,64	1,43
2003	3.443.768,10	1,32	3.259.108,06	1,32
2004	3.504.326,86	1,76	3.316.309,90	1,76
2005	3.567.130,66	1,79	3.375.744,10	1,79
2006*)	3.600.877,88	0,95	3.407.680,69	0,95
2007**)	3.632.560,35	0,88	3.437.663,30	0,88

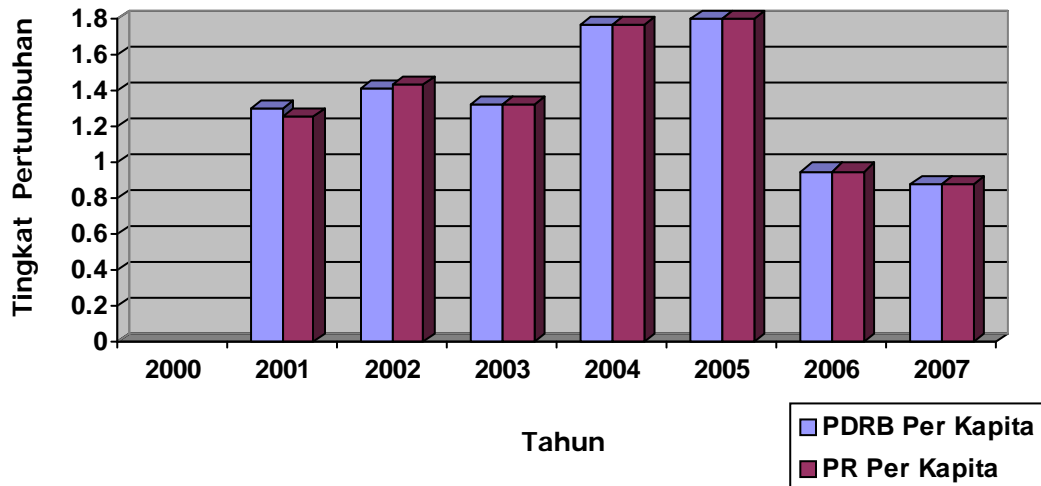
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2008

*) Angka diperbaiki

***) Angka sementara



Grafik 3.1
PDRB Per-Kapita dan Pendapatan Regional Per-Kapita
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000-2007



Tabel 3.2
PDRB Per-Kapita dan Pendapatan Regional Per-Kapita
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000-2007

Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun	PDRB Per Kapita		Pendapatan Regional Per Kapita	
	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2000	3.308.896,40	-	3.132.185,12	-
2001	3.636.440,32	9,90	3.442.205,36	9,90
2002	3.941.722,74	8,40	3.731.524,14	8,41
2003	4.310.072,92	9,34	4.083.523,45	9,43
2004	4.672.883,39	8,42	4.427.624,01	8,43
2005	5.176.161,92	10,77	4.904.487,63	10,77
2006*)	5.583.352,04	7,87	5.290.306,11	7,87
2007**)	6.139.763,85	9,97	5.817.514,28	9,97

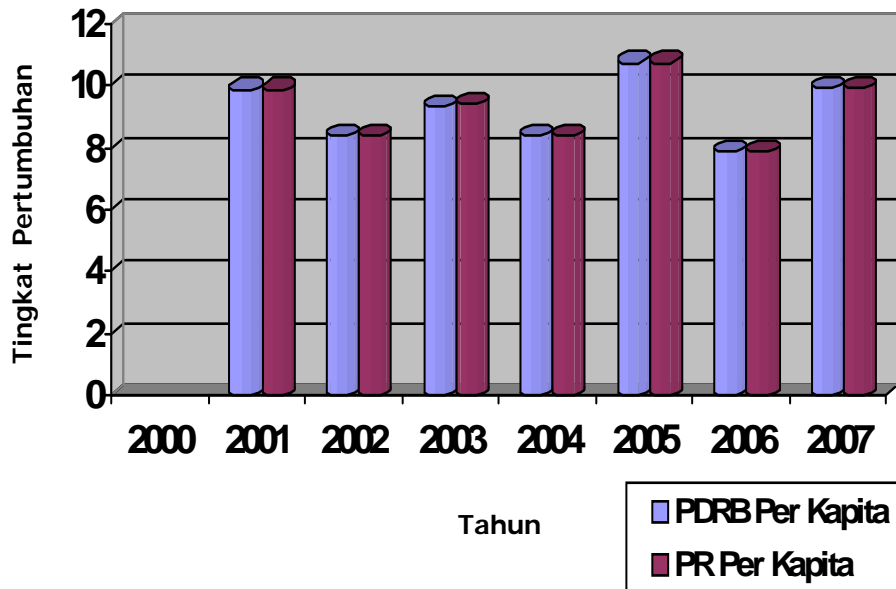
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2008

*) Angka diperbaiki

***) Angka sementara



Grafik 3.2
PDRB Per-Kapita dan Pendapatan Regional Per-Kapita
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000-2007



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang diukur dengan Produk Regional Bruto (PDRB) selama tujuh tahun (2000-2007) mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 sebesar 1.30%, pada empat tahun berikutnya terus meningkat menjadi 1.79%, akan tetapi dua tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 0.88 % nilai ini masih angka sementara yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie.



Tabel 3.3
Kontribusi Sektor Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar Tahun 2000-2007 (persen)

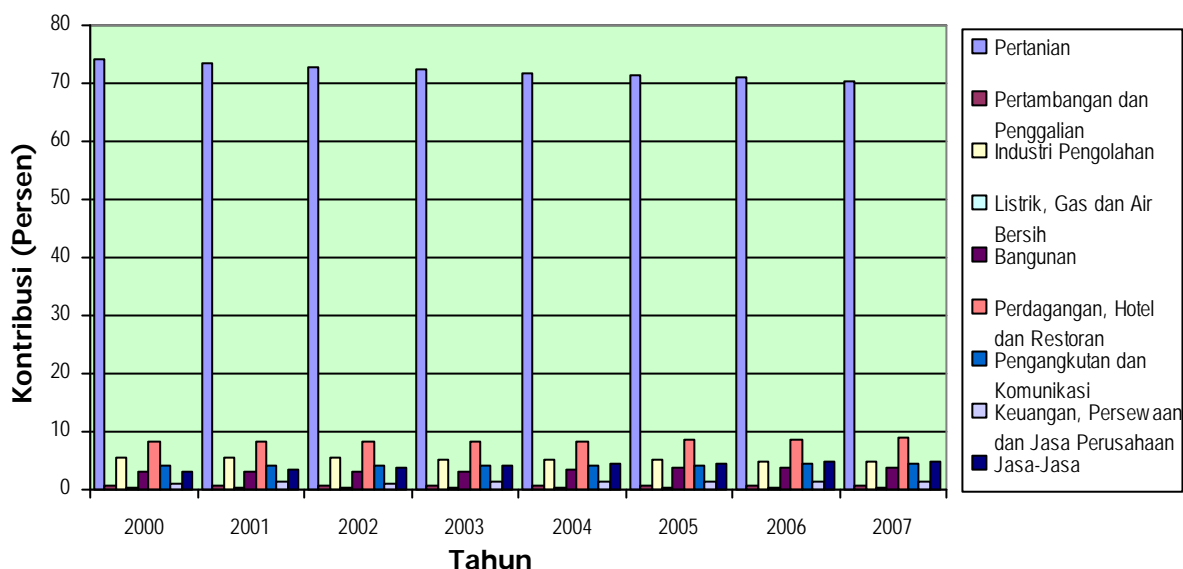
Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
1. Pertanian	74,15	73,31	72,85	72,40	71,83	71,29	70,96	70,51
2. Pertambangan dan Penggalian	0,74	0,73	0,76	0,76	0,78	0,81	0,82	0,83
3. Industri Pengolahan	5,41	5,39	5,42	5,32	5,34	5,16	4,93	4,75
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,27	0,27	0,26
5. Bangunan	3,11	3,14	3,18	3,24	3,44	3,68	3,83	3,88
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,20	8,42	8,39	8,29	8,33	8,47	8,57	8,81
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,01	4,04	4,13	4,14	4,16	4,29	4,46	4,52
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,03	1,22	1,15	1,27	1,29	1,42	1,40	1,54
9. Jasa-Jasa	3,07	3,48	3,84	4,30	4,54	4,61	4,76	4,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2008

*) Angka diperbaiki

***) Angka sementara

Grafik 3.3
Kontribusi Sektor Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar Tahun 2000-2007 (persen)





Berdasarkan harga konstan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Jaya tahun 2000-2007 sebagaimana tertera pada table 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2005 mencapai Rp. 3.567.130,66. Nilai ini meningkat 1.79 % dibandingkan dua tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.443.768,10 atau 1.32 %. Sedangkan Pada Tahun 2007 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan harga konstan tahun 2000-2007 tercatat sebesar Rp. 3.632.560,35 juta (besaran angka sementara yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie). Nilai ini juga mengalami kenaikan sebesar 0.88 % dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.600.877,88 atau sebesar 0.95 %.

Namun pada table 3.2 di atas berdasarkan harga berlaku Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2007 mencapai Rp. 6.139.763,85 juta atau 9.97 % (besaran angka sementara yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie). Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 5.583.352,04 juta atau 7.87 %.

Berdasarkan tabel 3.3 kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha pertanian yang pada tahun 2007 mencapai 70,51 %. Hal ini disebabkan, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Pidie Jaya bergerak dalam bidang pertanian. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan pertanian yang telah dilaksanakan perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tani. 0,26 % Lapangan usaha berasal dari listrik dan air minum pada tahun 2007 terjadi penurunan jika



dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 0.27 %. Kondisi ini disebabkan karena sektor ini belum tergarap dengan baik. Oleh karena itu, ke-depan sektor ini perlu terus dikembangkan agar dapat menghasilkan nilai ekonomi yang relatif tinggi dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan 2011

Prinsip Pembangunan yang berkelanjutan, merupakan orientasi pejawantahan untuk meningkatkan pembangunan yang adil dan merata dalam berbagai sektor pembangunan. Namun disisi lain ketercapaian harapan pembangunan harus didukung dengan potensi perekonomian yang baik. Ketercapaian itu harus didukung dengan kemampuan menggali dan mengembangkan potensi ekonomi menjadi pilar pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang dapat dirasakan oleh konsumen utama.

Kemandirian sebuah daerah, jika daerah mampu mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada baik ekonomi makro dan ekonomi mikro, yang keduanya saling mendukung dan mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah. Daerah yang mampu mewujudkan pertumbuhan prospek perekonomian yang berskala makro dengan mempertimbangkan potensi yang ada, akan mampu bangkit dari berbagai tantangan yang mendasari kehidupan ekonomi masyarakat.



Tantangan utama dalam perkembangan pembangunan ekonomi daerah yaitu :

1. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional yang inkonsisten akibat berbagai gejolak ekonomi global
2. Kurangnya sumberdaya manusia yang mampu menciptakan berbagai potensi pembangunan ekonomi daerah
3. Infrastruktur pendukung pengembangan potensi perekonomian belum maksimal dan terkelola dengan baik
4. Kebijakan-kebijakan yang kurang populis sehingga membuat arah perekonomian tidak berjalan dengan baik
5. Kebijakan Regulasi yang berorientasi terhadap pertumbuhan dan kemajuan ekonomi makro belum direkomendasi dengan benar
6. Kebergantungan terhadap pendapatan ekonomi dari pemerintah pusat cukup besar, dan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan dalam meningkatkan sector ekonomi masih rendah.
7. Peningkatan sumber pendapat ekonomi dari sektor ril belum berjalan optimal.
8. Tingkat pengangguran yang semakin tinggi akibat berbagai krisis ekonomi baik lokal maupun global, sehingga ketergantungan terhadap berbagai bantuan telah mengurangi kinerja pembangunan.



Sedangkan prospek untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro daerah yaitu :

1. Pidie Jaya sebagaimana daerah lain yang mengandalkan sektor unggulan dari sektor pertanian, perkebunan dan kelautan
2. Kakao yang merupakan komoditi unggulan yang berbasis perkebunan rakyat
3. Potensi sumberdaya manusia di sektor unggulan dapat diberdayakan melalui berbagai pembinaan dan pelatihan secara kontinuitas dan suistanabilitas.
4. Kebijakan pimpinan daerah yang mengedepankan peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan pemerataan akses ekonomi terutama sektor ril yang pro rakyat.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Atas dasar hal itu, pembangunan ekonomi juga dimaksudkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.



Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Walaupun indikator ini hanya mengukur tingkat pertumbuhan (*growth*) dalam hal perekonomian saja namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang bersumber pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah yang bersangkutan dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan selalu mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Namun dalam melaksanakan pembangunan, daerah sebaiknya lebih memperhatikan keunggulan-keunggulan dan karakteristik yang dimiliki setiap daerah tersebut. Partisipasi masyarakat di daerah dalam pembangunan akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita



akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Peningkatan pendapatan perkapita akan mendorong aktivitas ekonomi, karena permintaan yang meningkat sebagai akibat dari peningkatan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan ekonomi daerah di Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif partisipatif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang antara lain diukur dengan besaran yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah.



Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian, hal ini mengingat sebagian besar masyarakat bekerja di sektor ini. Meskipun sektor pertanian merupakan sektor paling besar menyerap tenaga kerja, namun sektor ini belum menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari pertumbuhan di sektor ini dari tahun 2000 sampai 2007 yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 2.03 %. Sektor perkebunan, sektor industri kecil dan rumah tangga serta sektor perikanan adalah merupakan sektor-sektor yang juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam rangka untuk lebih meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan sumber keuangan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya yang sah menurut undang-undang. Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan



daerah. Sedangkan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan dan belanja yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. Selanjutnya, anggaran sebagai manajemen berfungsi sebagai:

- a. Rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
- b. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
- c. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu dalam APBK tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya untuk mencapai pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut terfokus pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan penerimaannya. Hal ini mengingat sumber penerimaan lain dalam APBK masih sangat tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah pusat.

Kebijakan pendapatan juga diarahkan untuk meningkatkan dana perimbangan dengan asumsi melalui peningkatan retribusi daerah dan kondisi perekonomian makro membaik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah berasal dari :

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Berikut adalah beberapa usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan PAD adalah

1. Melakukan pendataan terhadap potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan/membuat penyesuaian atau perbaikan dan pembuatan qanun sebagai salah satu dasar hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak.
4. Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja sebagai unsur pelaksana PAD.
5. Melaksanakan intensifikasi penagihan terhadap objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
7. Optimalisasi pengelolaan keuangan dengan mempedomani *cashflow* dan kebutuhan keuangan daerah.
8. Melakukan investasi pada sektor-sektor yang menguntungkan seperti penyertaan modal pada perbankan dan sebagainya.



3.4.2. Kebijakan Pembiayaan

Penggunaan anggaran belanja daerah harus tetap terarah, efisien dan efektif dalam pembelanjaan pembangunan sesuai prioritas yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran. Jika terjadi defisit, pembiayaan yang dilakukan tetap harus mengacu pada arah kebijakan pembelanjaan. Defisit anggaran tersebut dibiayai terlebih dahulu melalui Sisa Lebih Perhitungan APBK tahun lalu yang merupakan selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah. Dalam menetapkan struktur pembiayaan guna membiayai atau menggunakan defisit atau surplus anggaran penetapannya dioptimalkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, apabila APBD diperkirakan surplus, maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah);



dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari; sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan belanja daerah, karena belanja daerah pada dasarnya merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu. Oleh karena itu, belanja daerah perlu dikelola secara terarah, sehingga pengurangan nilai kekayaan bersih dapat memberikan dampak positif pada masyarakat.

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Pidie Jaya dilakukan melalui dua sisi yaitu pertama; belanja untuk kepentingan pemberdayaan sektor publik. Hal ini tidak terlepas dari aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Belanja-belanja publik tersebut alokasinya dengan memperhatikan sisi prioritas dan efek multiplier dari pengeluaran belanja. Kedua; belanja aparatur, diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai seperti gaji, biaya pemeliharaan dan operasional dan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan bagi masyarakat.



Penggunaan anggaran belanja diarahkan untuk dapat mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2010 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah Tahun 2010 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian dan bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk; peningkatan pelayanan dasar berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan, penmbangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan



capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Kebijakan belanja secara umum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya proporsional.
2. Secara kewilayahan belanja daerah harus disusun secara adil dan proporsional. Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu diadakan anggaran penyeimbang; dan
3. Program yang direncanakan dan diperlukan bagi percepatan pembangunan daerah harus didukung dengan pendanaan yang memadai.



BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

4.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 merupakan bagian rencana pembangunan daerah jangka menengah Tahun 2009-2014. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya terpilih sebagaimana tercantum dalam Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014. Adapun prasyarat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan daerah adalah Pengamalan Ajaran Islam secara kaffah; pengembangan *good governance* dan *clean government*; Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan kemampuan keuangan; pengembangan pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan reformasi sistem politik. Secara kewilayahan, pembangunan daerah harus didasarkan pada penataan ruang dan penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai.

Untuk memberikan fokus pada pembangunan daerah Tahun 2010, diperlukan tujuan bersama (*common goals*) yang pencapaiannya membutuhkan tingginya derajat sinergitas lintas SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Sinergitas antar tingkat Pemerintah serta Sinergitas antar pelaku pembangunan baik Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tujuan bersama (*common goals*) tersebut



merupakan komitmen program dan kegiatan yang disepakati untuk dikerjakan melalui model pendekatan sinergisitas lintas SKPD Kabupaten Pidie Jaya dengan Penggalangan segenap pelaku pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang relevan.

Untuk memberikan arah yang lebih jelas bagi implementasi pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan bersama tersebut pada Tahun 2010, dibutuhkan penyusunan rencana tindak lanjut dalam setiap tujuan bersama di atas dengan mengacu pada dokumen RKPK Tahun 2010 secara keseluruhan.

Perwujudan tujuan bersama tersebut dilakukan melalui pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang menjadi dasar penetapan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2010. Prioritas pembangunan Daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan nasional, kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, Prediksi Perkembangan ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh prediksi perkembangan ekonomi global serta prediksi perkembangan ekonomi regional.

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan



perencanaan. Pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok daerah. Jika akan membangun suatu daerah, kebijaksanaan yang diambil harus sesuai dengan kondisi daerah berupa masalah, kebutuhan, dan potensi daerah yang bersangkutan.

Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 yaitu :

- 1) Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komoditi unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- 3) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal yang berkualitas;
- 4) Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat;
- 5) Pembinaan wawasan keislaman dan pelaksanaan syariat Islam secara berkelanjutan dan berkeadilan serta pembangunan sosial budaya;
- 6) Penguatan kelembagaan Pemerintah yang berbasis teknologi, Politik dan hukum.



4.1.1. Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komoditi unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan

Kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama dalam rangka memenuhi hajat kehidupan masyarakat. Namun kondisi ekonomi masyarakat terpengaruhi dampak krisis ekonomi global, sehingga terjadinya penurunan tingkat daya beli yang berdampak pula turunnya pertumbuhan ekonomi tahun 2008 bila dibandingkan dengan tahun 2007.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu upaya yang konkrit di tahun 2010 guna pemulihan kondisi ekonomi dengan mendorong pertumbuhan terutama dari sektor komoditi unggulan atau non migas yang selama ini memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB. Kondisi lainnya adalah masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang harus dilakukan dengan upaya pemberian kesempatan memperoleh pekerjaan terutama dengan membangun sektor ril dan sektor pertanian secara terpadu yang merupakan sarana yang akurat untuk membangun lapangan pekerjaan baru terutama bagi masyarakat miskin dan pengangguran.

Berdasarkan fenomena diatas maka kebijakan prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2010 di Bidang peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan dapat dilakukan melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi daerah terutama dengan sasaran komoditi unggulan, Pengembangan sentra-sentra produksi yang



berbasis komoditi unggulan, Pengembangan, Perbaikan, dan peningkatan fungsi sarana dan prasaranaperekonomian, menjaga kecukupan dan stabilitas pangan daerah, meningkatkan ketersediaan dan kestabilan arus distribusi barang terutama kebutuhan pokok masyarakat, mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutan sesuai arah dan fungsinya, Peningkatan pemanfaatan produksi hutan non kayu dan pengembangan hutan tanaman rakyat, Pengembangan dan rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat, Pengembangan populasi dan peningkatan produksi ternak, Pengembangan agribisnis dan mendorong terbangunnya agroindustri, Pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir, pengembangan perkoperasian dan Pemberdayaan UMKM, Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, Pengembangan dan pembinaan transmigrasi dalam kapasitas pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, dan Peningkatan realisasi investasi dan mendorong terciptanya kemitraan usaha;

4.1.2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

Upaya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2010 diprioritaskan untuk mengembangkan dan mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya agar berfungsi secara optimal, mengembangkan, mengelola dan mengkonservasi sumber-sumber air baik Sungai dan Sumber Air Lainnya, mengendalikan banjir pada daerah tangkapan dan badan-badan sungai, mengendalikan



pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta melakukan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam, percepatan pemanfaatan potensi energi terutama energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pemanfaatan potensi pertambangan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan lainnya dibidang infrastruktur adalah melakukan penanganan jalan dan jembatan yang lebih diarahkan kepada peningkatan kondisi mantap jalan dan jembatan serta penanganan jalan yang belum tembus untuk kemudahan transportasi masyarakat untuk pengangkutan komoditi.

Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan maupun jembatan diharapkan tidak mempengaruhi ekosistem dan tidak merusak lingkungan. Khusus program pemeliharaan jalan yang menggunakan sistem penanganan terpadu antar sector tetap dilanjutkan.

Penanganan jalan dan jembatan yang dilakukan sebagai proiritas tahun 2010 dilakukan melalui pembangunan Jalan dan Jembatan berikut bangunan pelengkapanya berupasaluran drainase/gorong-gorong, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan baik secara berkala maupun rutin, Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

Prioritas peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan untuk membantu pembangunan rumah dhuafa, pembangunan



dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan, permukiman, kawasan, dan lingkungan pada kecamatan dan pedesaan. Selanjutnya, memberikan dukungan kerjasama antar kecamatan dan desa dalam pengembangan kawasan tata ruang dan permukiman. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan sarana dan prasarana permukiman dan jaringan air bersih serta air limbah pada kabupaten/kota beserta bangunan pelengkapannya.

Prioritas pembangunan sektor perhubungan darat di arah pada pembangunan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ), dan Transportasi Perkotaan. Pembangunan lalu lintas jalan angkutan jalan (LLAJ) dipusatkan pada peningkatan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna lalu lintas angkutan jalan, peningkatan kelaikan kendaraan bermotor, menurunkan tingkat kecelakaan dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan, menciptakan efisiensi dan efektifitas serta keterpaduan antar moda.

4.1.3. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal yang berkualitas

Sebagaimana yang tersirat dalam pasal 31 UUD 1945 diperjelas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga berhak memperoleh layanan pendidikan. Hal tersebut juga ditopang oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 216 (1) mengamatkan bahwa setiap penduduk Aceh berhak mendapatkan pendidikan yang



bermutu dan islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan tahun 2010 di Kabupaten Pidie Jaya adalah memberikan kesempatan belajar dan layanan pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi konsentrasi pembangunan, yang selama ini lembaga tersebut belum menyentuh seluruh anak bangsa yang berusia antara 4-6 Tahun. Hal ini sebabkan masih kurangnya lembaga PAUD dalam tataran kehidupan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berupaya mengatasi kondisi tersebut dengan mengoptimalkan dan menambah pembangunan lembaga PAUD formal dan non formal secara merata di seluruh Pidie Jaya agar dapat diakses oleh masyarakat.

Masih belum tuntasnya pelaksanaan pendidikan wajib belajar Sembilan tahun di Kabupaten Pidie Jaya perlu perhatian yang maksimal dan progresif. Kondisi ini dapat dilihat dari capai APK penduduk antara usia 7-12 Tahun sebesar 103,56 % dan APM sebesar 84,40 % berada dibawah rata-rata provinsi. Untuk APK penduduk pada usia 13-15 sebesar 90,76 % dan APM sebesar 76,43 %, juga berada pada tataran dibawah rata-rata provinsi. Maka dengan kondisi tersebut kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengoptimalkan untuk memberikan peluang pemerataan pendidikan dengan penambahan ruang belajar dan penyediaan fasilitas kendaraan sekolah pada setiap kecamatan.

Sehubungan dengan pertumbuhan dan keberhasilan pendidikan Dasar 9 Tahun perlu diimbangi dengan peningkatan terhadap akses dan



layanan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK). Hal itu dapat dilakukan dengan penambahan jumlah Sekolah yang berorientasi keunggulan yang berbasis lokal dan rehabilitasi jumlah ruang kelas agar memenuhi kelayakan dalam proses pembelajaran.

Disamping itu, untuk mengantisipasi melonjaknya anak putus sekolah, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan pendidikan nonformal berupa paket A setara SD/MI dan Paket B serta paket C setara SMA/MA/SMK dan juga pelatihan keterampilan hidup (*life skill*). Pemberdayaan Dayah sebagai lembaga pendidikan non formal perlu dikedepankan, karena pendidikan dayah merupakan pendidikan yang berbasis kearifan local dari sejak dahulu, maka pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berupaya melatih system pengelolaan manajemen dayah, legislasi pendidikan dayah melalui paket akreditasi dan pemberian bantuan operasional pendidikan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informatika, guru sebagai pilot pendidikan perlu dikembangkan dan diberdayakan secara berkelanjutan dan professional, hal itu dapat dilihat masih lemahnya guru dalam menginovasi pembelajaran dan mengakses dunia maya. Maka pemerintah berusaha memfasilitasi dan melatih para guru dengan kegiatan seminar dan workshop pendidikan.

Hal ini sangat mempengaruhi peningkatan mutu dan profesionalitas guru, apalagi didukung dengan percepatan sertifikasi guru dan kepala sekolah guna pemenuhan kesejahteraan, serta peningkatan kualifikasi pendidikan minimal sebagai kelayakan mengajar bagi tenaga pendidik.



Penyebaran guru mata pelajaran yang belum merata perlu penataan secara optimal sehingga guru hanya menumpuk di sekolah tertentu.

Sistem tata kelola pendidikan perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui komite sekolah secara efektif dan mengimplementasikan system pengelolaan MBS. Kemudian, Pelaksanaan system pendidikan berbasis Islami masih mengalami kendala disebabkan belum adanya system pelayanan yang belum adanya penetapan SOP atau SPM, walaupun demikian upaya tersebut dilakukan dengan membangun fasilitas yang mendukung pelaksanaan pendidikan islami seperti pembangunan musalla, penyediaan buku pelajaran agama dan perekrutan guru-guru agama.

4.1.4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat

Kesehatan merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Untuk tahun 2010 prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak rakyat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

Sektor Kesehatan menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, hal itu dapat dilihat dari penurunan angka gizi buruk,



meningkatnya angka keselamatan ibu melahirkan, meningkatnya tingkat penanganan penyakit menular dan semakin kondusifnya pelayanan kesehatan dan peningkatan anggaran pembangunan kesehatan. peningkatan system pelayanan kesehatan publik mulai dari pelayanan dasar sampai dengan pelayanan rujukan terus mendapat pembenahan.

Sektor kesehatan yang menjadi perhatian untuk tahun 2010 yaitu penyediaan fasilitas kesehatan disetiap kecamatan dengan kondisi bangunan yang cukup memadai baik fasilitas pelayanan dasar maupun rujukan, dan juga diimbangi dengan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang cukup disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Disamping itu pemerintah daerah berusaha untuk tahun 2010 adalah melakukan peningkatan pengetahuan tenaga medis maupun non medis baik secara teknis maupun manajemen melalui kegiatan melanjutkan pendidikan dan pelatihan. Untuk meningkatnya akses pelayanan kesehatan harus didukung dengan sinergitas program yang baik semakin mempercepat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

4.1.5. Pembinaan wawasan keislaman dan pelaksanaan syariat Islam secara berkelanjutan dan berkeadilan serta pembangunan sosial budaya.

Masyarakat kita yang lahir, tumbuh dan hidup di dalam Islam, harus dapat mengimplementasi kehidupannya sesuai dengan keislaman.



Islam sebagai salah satu agama yang diturunkan Allah dengan legalitas kesempurnaan dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi umat manusia baik dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat.

Perkembangan teknologi dan kemajuan pengetahuan telah membuat masyarakat kita terpolusi dan tergedasi dengan perilaku diluar koridor keislaman. Maka prioritas pembangunan daerah dibidang tersebut adalah membangun kembali pengetahuan dan wawasan islam serta pemberlakuan syariat islam secara kaffah sebagaimana yang telah di wahyu Allah melalui Al-Qur'an dan diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui Sunnahnya (hadits-hadits shahih).

Pelaksanaan Pembangunan Syari'at Islam di Pidie Jaya dan Aceh Umumnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Prioritas Pembangunan tahun 2010 dalam pelaksanaan Syari'at Islam lebih dititik beratkan pada peningkatan pemahaman kesadaran pelaksanaan syari'at Islam, pemahaman yang akan dilakukan berupa sosialisasi berupa qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan Syari'at Islam.

Dalam upaya pelaksanaan syariat dan pembinaan wawasan keislaman melalui peningkatan kapasitas aparatur pelaksana syariat yang melaiputi pengembangan kapasitas lembaga MPU, lembaga syariat islam yang berfungsi menegakkan amar makruf nahi mungkar, menetapkan fatwa hukum Syari'at Islam, memberikan penyuluhan hukum kepada



masyarakat sebagai bimbingan keagamaan dan lembaga baitul mal sebagai wadah penataan pengelolaan keuangan umat yang berasal dari zakat, infak dan sadaqah yang berbasis ekonomi Islami dalam menjalani kehidupan keseharian. Hal itu sebagai amat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 kewenangan baitul Mal meliputi pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama dan masalah perwalian atau yang lebih dikenal sebagai amil plus.

Persoalan mendasar lainnya yang perlu penuntasan adalah permasalahan sosial selain sebagai dampak dari kegiatan pembangunan juga sebagai akibat terjadinya bencana sosial (konflik) dan bencana alam. Permasalahan di atas telah menumbuhkan peningkatan komposisi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial suatu persoalan kompleksitas dan berimplikasi dalam kehidupan, yang perlu penanganan secara intensif dan berkelanjutan. Upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial sering dihadapkan dengan terbatasnya kapasitas ketersediaannya sarana dan prasarana, ketenagaan, teknologi dan pembiayaan serta sistem penyelesaiannya.

Sektor lain yang membutuhkan Pembangunan adalah sektor kebudayaan dan pariwisata yang memiliki potensial untuk dikembangkan. Pidie Jaya sebagai wilayah kerajaan masa lalu memiliki beragam khazanah sejarah budaya yang khas dan unik, seperti banyaknya situs-situs sejarah yang belum dikembangkan dan dipelihara dan kondisi alam yang indah dan



alami merupakan asset berharga yang patut dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh. Pembangunan pariwisata sebagai objek promosi daerah untuk di tingkat provinsi dan Nasional bahkan untuk tingkat internasional.

Persoalan social lainnya yang sangat mendesak perlu dibangun untuk tahun 2010 adalah Pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di seluruh masyarakat bahkan di kalangan eksekutif dan legislatif. Kondisi itu dapat dilihat dari pengalaman di lapangan, masih banyak kalangan eksekutif dan legislatif masih kurang paham, sehingga memperlambat upaya mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan. Demikian pula halnya masalah perlindungan kualitas hidup anak, belum lahirnya qanun-qanun daerah untuk memberikan kesempatan belajar dan bermain serta rendahnya pelayanan bagi kepentingan anak melalui pemberian legalitas kelahiran mereka melalui akte kelahiran.

4.1.6. Penguatan kelembagaan Pemerintah yang berbasis teknologi, Politik dan hukum

Kabupaten Pidie Jaya sebagai daerah yang baru berdiri sekitar 2 (dua) Tahun, memerlukan penguatan kapasitas apartur yang menyeluruh dan aspek tata kelola pemerintah sehingga roda pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien.



Disamping itu persoalan dasar yang menjadi agenda nasional adalah pembentukan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintah yang bersih (Clean Government) melalui tata kelola pemerintahan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pemerintah secara konsisten mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penciptaan tata pemerintahan yang baik dan bersih, serta penyehatan birokrasi pemerintahan merupakan salah satu agenda dalam pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka kesempatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan sehingga dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Menyikapi persoalan diatas Pada tahun 2010 prioritas pembangunan diarahkan pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta system pengawasan dan pengendalian yang efektif. Perwujudan keinginan



masyarakat agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang dilandasi oleh transparansi pengelolaan anggaran, pemilihan program dan kegiatan yang berorientasi target orientied serta didukung dengan peningkatan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

4.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Arah pembangunan daerah yaitu untuk tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM) dalam kurun waktu yang direncanakan. Bila mengacu kepada kebijakan prioritas pembangunan tahun 2010 untuk menentukan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengaksesan hasil komoditi unggulan
2. Peningkatan sarana dan prasaran olah raga prestasi dan pembinaan organisasi cabang olah raga , terlaksananya even-even olah raga dan meningkatkan kemitraan olah raga.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor potensi daerah
4. Peningkatan pertumbuhan PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan dan harga berlaku.



5. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6. Terbangunnya dan terpeliharanya jalan dan jembatan
7. Terbangunnya saluran lingkungan masyarakat.
8. Pembangunan rumah dhuafa.
9. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas baik formal maupun non formal
10. Meningkatkan APM/APK pada semua jenjang pendidikan
11. Meningkatkan rasio jumlah murid dengan jumlah kelas 1 : 35
12. Peningkatan kualitas profesionalisme guru sesuai dengan bidang tugasnya melalui pelatihan dan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
13. Meningkatkan pendidikan for all yang berorientasi life skill melalui pendidikan formal dan non formal
14. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat
15. Meningkatkan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan minimal bagi masyarakat
16. Penyediaan obat-obatan bagi masyarakat secara gratis bagi masyarakat kurang mampu
17. Meningkatkan angka keselamatan bayi lahir hidup
18. Meningkatkan angka keselamatan ibu melahirkan
19. Meningkatkan umur harapan hidup masyarakat
20. Peningkatan sosialisasi syariat Islam



21. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan syariat Islam
22. Meminimalisir jumlah pelanggar syariat Islam
23. Menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan social
24. Meningkatkan kemadirian masyarakat di daerah terpencil dengan berbagai pelatihan keterampilan hidup
25. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentang/penyandang masalah sosial, perlindungan hukum bagi masyarakat korban tindak kekerasan
26. Membangkitkan kembali potensi budaya daerah sebagai objek wisata.
27. Peningkatan konservasi dan perlindungan sumber daya alam.
28. Meningkatkan kedisiplinan, kinerja aparatur dan kelembagaan pemerintah dari tingkat gampong, kemukiman, kecamatan dan kabupaten
29. Menurunkan tingkat pelanggaran dalam penyalahgunaan wewenang dan unsur KKN
30. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan peningkatan sumber daya aparatur.
31. Terselenggaranya sosialisasi/advokasi hukum dan pembahasan Qanun daerah.
32. Terselenggaranya pembinaan pemerintahan desa melalui peningkatan dana alokasi gampong.



33. Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan prinsip amanah, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
34. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, tata ruang, sarana dan prasarana
35. Meningkatnya sarana komunikasi, informasi melalui terbangunnya jaringan komunikasi kabupaten



BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyetarakan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antar desa, antar kota dan desa, antar sektor, serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, daerah terpencil serta daerah minus, sehingga terwujudnya pembangunan yang merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah yang tepat guna, berhasil guna, efektif dan efisien menuju tercapainya kemandirian daerah.

Pembangunan daerah memerlukan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan yang bertujuan secara umum untuk mensejahterakan masyarakat. Perencanaan yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tersebut, dan juga memerlukan suatu analisis yang mendalam. Penetapan berbagai program pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga sasaran yang ingin diwujudkan dapat tercapai tepat guna dan berhasil guna. Program pembangunan



Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2010 dirumuskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan prioritas pembangunan daerah, antara lain adalah :

5.1 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SERTA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT YANG BERBASIS KOMODITI UNGGULAN DALAM USAHA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi dari berbagai sector dan potensi daerah, sehingga dapat menanggulangi penurunan tingkat kemiskinan. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2010 adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi. Sasaran di bidang ekonomi perlu dilaksanakan koordinasi perencanaan agar antar instansi saling menunjang dan kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan LSM Lokal dan LSM Asing agar bisa disinergikan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang



Ekonomi, Kajian Pengembangan Kakao, dan Fasilitas Cetak Sawah Baru

2. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Program ini diharapkan dapat mengembangkan kualitas tenaga kerja dalam rangka memperoleh kesempatan kerja. Namun hal itu harus didukung dengan komponen yang lain yaitu lapangan kerja dari berbagai dunia usaha. Untuk mendukung program tersebut dengan kegiatan-kegiatan yaitu pembangunan balai latihan kerja, pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.

3. Program peningkatan kesempatan kerja.

Program ini bertujuan dapat meningkatkan kesempatan kerja masyarakat melalui berbagai informasi dengan memberikan perbekalan dan keterampilan kerja serta membantu pelayanan administrasi yang mudah dan murah. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan penyebaran informasi tenaga kerja, serta kerjasama pendidikan dan pelatihan.

4. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat melalui peningkatan keanekaragaman dan kualitas pangan sesuai pola pangan harapan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian,



terpenuhinya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh seluruh rumah tangga secara berkesinambungan dan terpadu. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Peningkatan penyuluhan produksi pertanian/perkebunan, pengembangan kebun karet rakyat, penyusunan data base potensi produksi pangan, pengembangan lumbung pangan desa, pengembangan desa mandiri pangan. Penanganan daerah rawan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan, dan pengadaan sarana kerja penyuluh pertanian.

5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan dengan melaksanakan sistem pemasaran terpadu melalui pusat distribusi komoditi unggulan yang akan memberikan manfaat dan nilai jual yang menguntungkan bagi semua pihak. Sasaran yang ingin dicapai adalah terpasarkan produksi hasil pertanian daerah terutama dipasar regional dan meningkatkan nilai jual produksi tersebut secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan PAD. Program ini terealisasi dengan baik melalui Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan komoditi



Unggulan Daerah dan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

6. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan seluruh hasil teknologi yang berorientasi memberikan kemudahan dan peningkatan hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat. Sararan program ini untuk membantu masyarakat meningkatkan hasil pertanian/perkebunan secara berkelanjutan. Program ini akan terlaksana dengan baik melalui kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian, penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna, pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna.

7. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha tani di kawasan sentra produksi melalui diversifikasi usaha dengan komoditas bernilai tinggi dan berdaya saing untuk peningkatan nilai tambah petani disamping dalam rangka mendukung pencaangan konsep Aceh Green dan Issue Pemanasan Global melalui pemanfaatan lahan kritis memperbaiki lahan produktif. Sasaran yang ingin dicapai adalah memperluas dan memanfaatkan daerah basis Produksi secara berkelanjutan, pengembangan kawasan sentra produksi komoditi unggulan daerah. Kegiatan yang



dilaksanakan dalam program ini yaitu Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan, Pembangunan kebun kakao rakyat, Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat.

8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Program ini bertujuan membantu para petani dalam meningkatkan produksi hasil pertanian serta memberikan berbagai fasilitas pendukung dalam usaha meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan hidup petani. Sasaran program ini adalah seluruh petani yang aktif dan berpotensi mengurangi dampak kemiskinan. Program ini dapat diwujudkan melalui kegiatan SPLHT Tanaman Kakao, peningkatan SDM Perkebunan dan Pertanian.

9. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan para penyuluh lapangan agar lebih berkompetensi melalui peningkatan SDM dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tani, sehingga para petani/kelompok tani terampil dalam mengembangkan usaha taninya. Sasaran yang ingin dicapai adalah menciptakan para penyuluh dan pendamping yang lebih handal dan memiliki wawasan dalam mengembangkan usaha budidaya dan penanganan permasalahan di lapangan. Program ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan pelatihan dan pemberdayaan penyuluh.



10. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah.

Prioritas program ini adalah meningkatkan keunggulan kompetitif, sehingga UMKM mampu meningkatkan daya saingnya. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya SDM para pelaku serta pembinaan UKM terutama berkaitan dengan **entrepreneurship**. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan Pelatihan manajemen koperasi/KUD.

11. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Pelaksanaan program ini adalah untuk memperkuat sistem pendukung bagi pengembangan UMKM sehingga kontribusinya terhadap perekonomian daerah lebih signifikan. Sasaran yang ingin dicapai adalah menguatnya sarana dan prasarana usaha UMKM melalui pemanfaatan kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan koperasi; Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM; Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal.



12. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran Koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonomi daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan (**capacity building**) koperasi sehingga lembaga koperasi daerah dapat menjadi pilot proyek ketahanan ekonomi dan terus menjadi tangguh dan handal. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.

13. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan daya dukung sarana dan prasarana daerah terhadap peluang pengembangan dan pelaksanaan investasi. Sasaran yang diharapkan adalah Tergalinya potensi investasi di semua sector dan sarana dan prasarana pendukung investasi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi.

14. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

Program ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai serangan hama dan penyakit yang dapat menghambat produktivitas usaha peternakan. Sasaran yang ingin dicapai adalah



pengecegan dan pengendalian serangan explosif berbagai penyakit ternak baik yang bersifat endemik maupun sistemik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pendataan Masalah Peternakan, Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit Menular dan Gangguan reproduksi pada ternak, Penanggulangan Kasus Flu Burung, Diagnosa Penyakit Hewan dan Peningkatan Mutu Genetik, Peningkatan Kegiatan Inseminasi Buatan (IB).

15. Program peningkatan produksi hasil peternakan.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha peternakan di kawasan sentra-sentra peternakan dengan komoditas bernilai tinggi dan berdaya saing untuk peningkatan nilai tambah hasil peternakan. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan pendistribusian hasil ternak dan sumber daya manusia bidang peternakan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pembibitan dan Perawatan Ternak, Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, Pengembangan Agribisnis Peternakan, Monitoring Evaluasi dan pelaporan, Perencanaan Pembangunan Peternakan, Pembangunan Kawasan Peternakan terpadu, Pembangunan Kebun Rumput HMT dan Padang Penggembalaan, Pengembangan Kawasan Agribisnis Ternak Unggas Petelur, Fasilitas Pengembangan Kawasan Agropolitan.



16. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

Program ini bertujuan untuk menerapkan teknologi tepat guna di bidang peternakan yang mampu meningkatkan produktivitas usaha peternakan yang lebih efektif dan efisien. Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan hasil produksi peternakan yang stabil dan tangguh. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Penelitian dan Pengembangan Tehnologi Peternakan Tepat Guna, Pelatihan dan bimbingan pengoperasian tehnologi Peternakan Tepat Guna.

17. Program rehabilitasi hutan dan lahan.

Program bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hutan akibat dari illegal loging dan penebangan liar serta perluasan lahan tanpa memperhatikan kondisi ekosistem alam. Sasaran program ini untuk memberikan perlindungan kembali hutan agar terhindar dari erosi dan abrasi dan sumber perlindungan air. Program ini akan terwujud dengan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan (DBH-SDA) dan pengembangan hutan pantai.

18. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dilingkungan masyarakat pesisir melalui pembinaan, pendampingan usaha dan penciptaan usaha



baru di wilayah pesisir. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.

19. Program pengembangan budidaya perikanan.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan skala usaha kawasan perikanan budidaya, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya melalui kegiatan teknologi budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan produksi melalui penerapan teknologi tepat guna. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pengembangan bibit ikan unggul, Pengadaan calon induk ikan unggulan, Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar, Pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan, Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau, Peningkatan kawasan untuk pengembangan komoditi unggulan, perikanan budidaya, Pembangunan perikanan budidaya terpadu, Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, Pembinaan dan pengembangan perikanan, Pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan, Meningkatkan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) melalui fasilitas sarana dan prasarana kantor.



20. Program pengembangan perikanan tangkap.

Program ini bertujuan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan dan pengelolaan usaha nelayan serta menetapkan kawasan penangkapan, sentral perikanan dan industri perikanan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pengadaan alat bantu operasional penangkapan ikan, Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap, Motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan daya jelajah dan produktifitas nelayan, Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pemeliharaan rutin / berkala Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

21. Program optimalisasi pengelola dan pemasaran produksi perikanan.

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumberdaya kelautan dan perikanan budidaya dalam upaya peningkatan produksi/produktifitas hasil perikanan melalui peningkatan pemasaran produksi perikanan dengan tetap mempertahankan mutu hasil dan penanganan pasca panen. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya peluang pasar nasional dan internasional



terhadap komoditi hasil perikanan di pasar global. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium (LPPMHP) sesuai dengan SOP dan GLP Kegiatan magang kelompok usaha bersama (KUB) perikanan dan kelautan.

22. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

Program ini bertujuan untuk mengendalikan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari yang berbasis masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sosialisasi manfaat pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Identifikasi dan penangkaran ikan, Pengawasan dan penertiban ilegal fishing.

23. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang yang berkualitas dan harga terjangkau dan mendukung kelancaran distribusi arus barang ke seluruh wilayah Aceh. Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu



Pengembangan pasar dan distribusi barang produk, serta Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan lainnya.

24. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Program ini bertujuan untuk membantu dan mengembangkan pedagang kaki lima sebagai sentra peningkatan kesejahteraan masyarakat, Sasarannya untuk meningkatkan produktifitas pedagang kaki lima. Untuk mencapai program tersebut melalui kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

25. Program pengembangan industri kecil dan menengah.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha industri kecil, industry rumah tangga dan menengah yang berbasis produk unggulan dengan mengacu pada basis pembangunan daerah, yaitu memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya ekonomi lokal. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha industri kecil dan industri menengah serta meningkatnya pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat melalui pola kemitraan sekaligus akan mengurangi kemiskinan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Fasilitas pengembangan usaha industri kecil dan menengah (Pemberdayaan Dekranas).



26. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Program ini di dukung oleh beberapa kegiatan antara lain yaitu Pembinaan pengembangan PKK/PNPM, Pelatihan manajemen pemerintah desa, Pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat miskin, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pemukiman (PEMK), Pembinaan unit pengaduan masyarakat dan pemantauan PKBS-BBM.

27. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan para kader masyarakat gampong. Kegiatan pada program ini antara lain Peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kelembagaan dan SDM gampong/kelurahan, dan Peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong/kelurahan.

28. Program Penanggulangan Kemiskinan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan meningkatkan pelayanan masyarakat gampong di daerah tertinggal/terisolir. Keterbelakangan yang terjadi disebabkan kualitas masyarakat yang perlu ditingkatkan terutama pemahaman efisiensi kerja dan kualitas kerja serta didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan tentang system pengelolaan keuangan dalam keluarga memalui pemberdayaan ekonomi gampong. Kegiatan



yang mendukung program ini antara lain adalah Perencanaan dan pemberdayaan pemukiman masyarakat tertinggal, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG).

29. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap teknologi tepat guna. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain adalah Koordinasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, Pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat, Pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), dan Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong (BKPG).

30. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk terlaksananya penyusunan perancangan Qanun tentang APBK Pidie Jaya, tersedianya dokumen penjabaran dan perubahan APBK Pidie Jaya, tersusunnya rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Pidie Jaya dan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Pidie Jaya, serta terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya sistem manajemen keuangan daerah yang sempurna dan akuntabel.



Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

5.2 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kondisi jalan dan jembatan sehingga mampu mengakses dan memperlancar arus transportasi dan mendukung jalannya roda ekonomi masyarakat secara efektif dan berkesinambungan. Rencana program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2010 adalah :

1. Program pembangunan jalan dan jembatan.

Program ini bertujuan mempercepat akses pelayanan perpindahan barang, manusia, dan jasa dengan menyediakan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas, aman dan nyaman. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi Perencanaan pembangunan jalan, Pembangunan jalan, Perencanaan Pembangunan Jembatan, Pembangunan Jembatan dan Monitoring; evaluasi dan pelaporan

2. Program pembangunan saluran drainase / gorong – grong.

Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang memadai, sehingga air limbah masyarakat dan air hujan tidak menggenangi pekarangan rumah dan tempat tinggal penduduk, kondisi dapat meningkatkan kualitas kesehatan



masyarakat. Untuk mendukung program ini dapat dilakukan melalui Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong.

3. Program pembangunan turap / talud / bronjong.

Program ini bertujuan untuk menjaga kondisi sungai dari abrasi atau erosi akibat terjangan air, oleh karena program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjaga fasilitas sungai melalui kegiatan pembangunan bronjong

4. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan.

Program ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi jaringan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi pendukung utama untuk menghidupkan perekonomian masyarakat agar tetap dalam kondisi mantap. Untuk mewujudkan program ini dapat dilakukan dengan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

5. Program rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong.

Program ini bertujuan untuk menjaga fasilitas pembangunan masyarakat terutama talud sebagai jaringan saluran air limbah masyarakat, kerusakan akibat kondisi alam dan dimakan usia maka perlu dilakukan pemeliharaan yang kotinuitas. Untuk mendukung program tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan talud/bronjong.



6. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

Program ini bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan melalui perangkat pendukung operasional, sehingga program-program kebinamargaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Program ini terlaksana dengan baik melalui Kegiatan sebagai berikut yaitu Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat, Pengadaan Alat-alat Berat Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Program ini bertujuan untuk membantu peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dalam membantu sector pertanian. Kekurangan air disebabkan distribusi air yang belum efektif dan efisien, maka perlu penanganan yang serius melalui kegiatan perencanaan pembangunan irigasi dan perencanaan bangunan pintu air serta pemeliharaan jaringan irigasi.

8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Program ini bertujuan meningkatkan kinerja institusi pengelolaan air minum dan air limbah baik dipertanian maupun di pedesaan dengan mengikutsertakan peran aktif masyarakat dan pihak



swasta. Program ini akan terlaksanakan dengan baik melalui Kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya seperti Fasilitas Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum, Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

9. Program pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Program ini bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung perkembangan dan pertumbuhan sector ekonomi di wilayah strategis, dengan program tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengandalkan keunggulan geografis dan potensi daerah. Untuk mendukung program tersebut dapat dilakukan melalui Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur ke daerah sentra produksi ekonomi masyarakat.

10. Program pembangunan infrastruktur pedesaan.

Program ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur pedesaan yang memadai di terutama daerah yang memiliki potensi ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata .Program ini dapat direalisasikan melalui Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan, Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung.



11. Program pembangunan perumahan.

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk memperoleh fasilitas tempat penginapan yang layak dan sehat melalui pembangunan rumah dhuafa. Program ini direalisasikan melalui kegiatan pembangunan rumah sederhana dan sehat

12. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen persampahan baik diperkotaan maupun diperdesaan. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah: Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah, Pengembangan teknologi pengolahan sampah, dan perencanaan pengadaan alat-alat daur ulang sampah.

13. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sarana pengkajian dampak lingkungan dan koordinasi dalam mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penegakan hukum secara konsisten terhadap pelaku pencemaran dan perusak lingkungan. Program tersebut akan terlaksanakan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pemantauan kualitas lingkungan, pengkajian dampak lingkungan krueng meureudu, dan perencanaan pembangunan gedung lab. Lingkungan hidup.



14. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan upaya konservasi sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat di sekitar sumber daya alam yang akan dijaga. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjaga kelestarian sumberdaya alam. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber daya air Pengendalian Terpadu kerusakan sumber-sumber air.

15. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pengendalian polusi lingkungan dari berbagai material padat dan cair yang berdampak kepada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi.

16. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengawasan dan pengendalian RTH



17. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan .

Program ini bertujuan untuk penyediaan prasarana dan fasilitas di bidang perhubungan darat secara khususnya dan laut sebagai transportasi alternative, sehingga dapat menghasilkan suatu sistem transportasi yang baik, andal, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan program tersebut dapat dilakukan melalui Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan, Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan, Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan darat,

18. Program peningkatan pelayanan angkutan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan angkutan yang efektif dan efisien terhadap angkutan barang, jasa dan manusia. Program ini terlaksanan melalui Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya, Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan, Fasilitas Perijinan di Bidang Perhubungan, dan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.



19. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, dan laut agar terciptanya sistem perhubungan yang efektif, efisien, berkualitas dan aman. Untuk terwujudnya program ini hanya melalui Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut yaitu Pembangunan Gedung Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan, Pembangunan Halte, Bus, Taxi dan Gedung Terminal, Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut, dan pembangunan Prasarana Pos dan Telekomunikasi.

5.3 PENINGKATAN AKSES DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SERTA PENDIDIKAN NON FORMAL YANG BERKUALITAS

Pada Tahun 2010 rencana pembangunan sektor pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. Rencana program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2010 adalah :



1. Program pendidikan anak usia dini.

Pembangunan pendidikan usia dini diarah untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan, dan fasilitas pendukung pendidikan sehingga tahun 2010 pendidikan ini mampu menampung dan memberikan rasa aman dalam belajar bagi seluruh anak usia 3-6 tahun memperoleh pendidikan pra sekolah. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan antara lain adalah Pembangunan gedung PAUD, Pengadaan fasilitas bermain, Pengadaan Alat praktik dan alat peraga, Pengadaan dan pemeliharaan meubiler sekolah, Pengadaan perlengkapan sekolah, dan Pemberian biaya operasional PAUD.

2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Program ini diimplementasikan terhadap berbagai isue strategis tentang wajib belajar Sembilan tahun yang meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama, Peningkatan tingkat angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) kedua pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain yaitu Pembangunan gedung sekolah, Pengadaan buku, alat praktik dan alat peraga, Pengadaan dan pemeliharaan meubiler sekolah, Pengadaan perlengkapan sekolah, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, Bantuan operasional sekolah SD/MI dan SMP/MTs, Pembinaan kelembagaan sekolah, Penyelenggaraan Paket B setara SMP, Penyelenggaraan UN dan



UAS, Pelatihan Pelaksanaan MBS, Pelatihan penyusunan KTSP, Penyelenggaraan akreditasi SD/SMP, Penyelenggaraan olimpiade mata pelajaran tingkat SD/SMP.

3. Program pendidikan menengah.

Program ini lebih berorientasi pengembangan terhadap kemampuan skill dan kualitas peserta didik, namun kondisi pendidikan selama ini masih memerlukan perhatian terhadap mutu dan sarana dan prasarana yang belum memadai, maka untuk mengimplementasikan program ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain adalah Pembangunan gedung sekolah, Pengadaan Buku, alat praktik dan alat peraga, Pengadaan dan pemeliharaan meubileur sekolah, Pengadaan perlengkapan sekolah, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, Bantuan operasional sekolah SMA/MA/SMK, Pembinaan kelembagaan sekolah, Penyelenggaraan Paket C setara SMA, Penyelenggaraan UN dan UAS, Pelatihan Pelaksanaan MBS, Pelatihan penyusunan KTSP, Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah, Lomba siswa berprestasi, Penyelenggaraan olimpiade bidang studi.

4. Program pendidikan non-formal.

Program ini merupakan penunjang utama keberhasilan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM, dengan pendidikan ini telah dapat membantu pemerintah, hal itu telah dibuktikan dengan



hadirnya pendidikan dayah yang aktif melahirkan anak bangsa yang berkualitas dalam bidang keagamaan, namun disisi yang lain perlu adanya perhatian terhadap peningkatan fasilitas sarana dan prasarana serta mengakomodir terlaksananya bantuan operasional bagi kegiatan lembaga pelaksana program tersebut. Untuk dapat terlaksananya program ini secara maksimal dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan antara lain sebagai yaitu Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal, Pengembangan kurikulum pendidikan dayah, Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal, Pembangunan pendidikan non formal, Akreditasi pendidikan dayah.

5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

Mutu tenaga pendidik dan kependidikan merupakan tolok ukur untuk mendukung terwujudnya SDM bangsa yang andal. Namun selama ini kendala kualitas guru sangat memprihatikan, maka untuk terlaksananya program ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan antara lain adalah Pelaksanaan sertifikasi guru, Uji kompetensi bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, Pembinaan KKG dan MGMP, Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, Pengembangan system pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga



kependidikan, Perlombagaan guru, Pengawasa dan Kepala berprestasi, Perlombaan Inovasi pembelajaran bagi tenaga pendidik.

6. Program manajemen pelayanan pendidikan.

Program ini menuntun terwujudnya system pelayanan pendidikan yang berorientasi kepada manajemen berbasis sekolah. Namun terkendalnya program tersebut disebabkan kurangnya perhatian dari stakeholder pendidikan. Maka untuk dapat merealisasikan program tersebut melalui kegiatan-kegiatan antara lain adalah Supervisi Pengawasan Satuan Pendidikan, Pembinaan UKS, Peringatan Hardiknas dan HUT PGRI, Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang issue pendidikan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5.4 PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU BAGI MASYARAKAT.

Kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan utama yang harus dijadikan prioritas pemerintah, hal itu sebagai amanah menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas dan berbudi. Persoalan kesehatan merupakan masalah yang kompleks dan pelayanan yang diharapkan belum dapat menyentuh seluruh masyarakat disebabkan fasilitas dan sarana kesehatan belum mencukupi. Pelayanan yang maksimal harus diberuikan kepada masyarakat yang termarjinalkan karena factor biaya, maka pemerintah berusaha secara maksimal untuk



dapat membantu pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin. Rencana program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2010 adalah :

1. Program obat dan perbekalan kesehatan.

Program ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan. Program ini di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.

2. Program upaya kesehatan masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemahaman penggunaan farmasi kesehatan dan obatan yang berkualitas dan murah. Program ini diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generic esensial, peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan dan peningkatan pelayanan kesehatan jiwa.

3. Program pengawasan obat dan makanan.

Program ini bertujuan untuk peningkatan kesiagaan terhadap obat-obatan yang kadaluarsa dan tidak layak pakai bagi masyarakat,



serta pengendalian terhadap penyediaan makanan masyarakat. Program ini akan teralisasi dengan baik melalui kegiatan peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat-obatan, Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, dan peningkatan penyidikan dan penegakan hukum dibidang obat dan makanan.

4. Program perbaikan gizi masyarakat.

Program ini bertujuan untuk menanggulangi gizi buruk melalui pemberian makanan bergizi dan pelayanan kesehatan terpadu sehingga tingkat gizi buruk dalam masyarakat terus menurun secara cepat dan akurat. Dalam rangka pencapaian program tersebut perlu diimplementasikan melalui kegiatan penanggulangan KEB/AGB/GAKI

5. Program pengembangan lingkungan sehat.

Program ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kondisi lingkungan yang sesuai dengan ketentuan kesehatan. Dengan lingkungan yang sehat dapat menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Untuk mengimplentasikan program tersebut harus melalui kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat, dan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.



6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Program ini di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan, dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Program ini bertujuan membangun masyarakat yang bebas dari bahaya penyakit menular, seperti demam berdarah, malaria dan muntah mencret, maka untuk itu perlu peningkatan kualitas kesehatan melalui berbagai pencegahan sarang-sarang penyakit menular. Program ini akan terwujud melalui kegiatan Penyomprotan foging sarang nyamuk, penyomprotan foging sarang lalat, pengadaan bahan dan alat foging, pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dan pencegahan penularan penyakit endemik.



8. Program Standarisasi pelayanan kesehatan.

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan melalui prosedur standar pelayanan, sehingga memberikan hasil yang maksimal dan dirasakan oleh masyarakat secara kualitas dan kuantitas. Program ini akan terlaksana melalui beberapa kegiatan yaitu pembangunan dan pemutakhiran data dasar satandarisasi pelayanan kesehatan, dan penyelenggaraan satandarisasi tenaga pelayan kesehatan teladan.

9. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.

Program ini bertujuan membantu masyarakat miskin untuk memperoleh layanan kesehatan secara gratis dan berkualitas. Program ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan pengobatan gratis operasi katarak, dan pelayanan sunat missal.

10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengadaan fasilitas kesehatan yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat dengan fasilitas bermutu, mudah dijangkau dan murah. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan Puskesmas, dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.



11. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan, terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, terbangunnya rumah sakit yang representatif, menjamin terselenggaranya pemerintah melalui program askeskin, peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan upaya kesehatan perorangan, peningkatan pelayanan rujukan, pembangunan sarana dan prasarana RSUD Daerah Pidie Jaya. Program ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan pembangunan rumah sakit, pengadaan obat-obatan rumah sakit, pengadaan bahan logistic rumah sakit, dan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit.

12. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.

Program ini bertujuan meningkatkan akses pelayanan yang maksimal berdasarkan standar pelayanan minimal. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita.

13. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat.

Program ini bertujuan menjaga dan mengasi seluruh aktifitas pelayanan produksi makanan baik produksi rumah tangga maupun



industri lainnya. Program ini dapat terlaksananya dengan baik melalui kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil industri rumah tangga dan pengawasan dan pengendalian keamanan kesehatan makanan restoran.

14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

Program ini bertujuan meningkatkan harapan hidup masyarakat dan merehabilitasi para lanjut usia dengan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas. Program ini dapat terwujud melalui kegiatan pembangunan panti asuhan dan pemeliharaan kesehatan lansia.

15. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Program ini bertujuan meningkatkan angka keselamatan ibu dan bayi terutama untuk penduduk miskin. Program ini dapat terlaksanan dengan baik melalui prioritas kegiatan penyuluhan keselamatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.

16. Pembangunan fasilitas kesehatan Poskesdes.

Program ini bertujuan membangun fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat dan sebagai tempat pelayan pertama bagi pencapai kesehatan masyarakat. Program ini akan terlaksana melalui kegiatan pembangunan poskesdes, dan pengadaan fasilitas kesehatan masyarakat.



17. Program keluarga berencana.

Program ini bertujuan membantu masyarakat terutama pasangan suami isteri baru dan menjaga kehamilan dan pengaturan kehamilan. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.

18. Program kesehatan reproduksi remaja.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi remaja dan melakukan berbagai perlombaan yang dapat memotivasi para remaja untuk menjaga kesehatan sejak dini. Program ini terlaksana melalui implementasi kegiatan perlombaan PIK KRR tingkat Kabupaten.

19. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

Program ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan layanan dan pembinaan tentang keluarga berencana dan sejahtera. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pendampingan bagi kelompok UPPKS.

5.5 PEMBINAAN WAWASAN KEISLAMAMAN DAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN SERTA PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA.

Pembangunan mentalitas dan karakter masyarakat harus dimulai dengan peningkatan wawasan keislaman. Menurunnya perhatian



masyarakat terhadap nilai Islam merupakan tantangan yang harus menjadi prioritas pembangunan, apalagi bila dilihat dari perhatian para pemuda terhadap nilai-nilai kelstarian budaya daerah yang semakin hari semakin menghilang. Maka pemerintah dalam rangka meningkatkan pola laku dan tatanan social budaya masyarakat mengharapkan adanya dukungan yang berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap prioritas ini. Rencana program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2010 adalah :

1. Program Pengembangan Sistem Informasi Syariat Islam.

Program ini bertujuan memberikan layanan informasi yang jelas dan terarah kepada masyarakat agar mamahami tentang pentingnya syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pembuatan uraian hasil qanun, Penyediaan buku dan kitab, dan Sosilaisasi Qanun Secara berkala.

2. Program pembinaan syariat Islam.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan Syari'at Islam secara kaffah dan memantapkan pelaksanaan amal ibadah, pendalaman ilmu agama Islam bagi pemeluknya, dan menghidupkan syi'ar Islam serta membina kerukunan hidup antar umat beragama dengan cara meningkatkan informasi syariah Islam, melaksanakan kegiatan operasional da'i wilayah perbatasan dan daerah terpencil, dan meningkatkan pengetahuan imum meunasah



tentang pelaksanaan syariat Islam. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan yaitu Pelatihan peningkatan kapasitas imuem meunasah dalam pelaksanaan Syariat Islam, dan Pembinaan gampong percontohan bersyariat Islam.

3. Program pengawasan dan pelaksanaan Syariat Islam.

Program ini bertujuan untuk menjaga efektifitas dan efiesiensi dalam pengawasan dan pelaksanaan hukum syariat islam. Rendahnya kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan hukum syariat perlu pemikiran dan aktualisasi yang mantap. Sasaran utama kegiatan ini adalah pelaksana pengawasan syariat Islam agar dapat bekerja secara maksimal dan professional. Untuk terealisasinya program tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan Qanun syariat, Pemberdayaan tenaga pengawasan syariat dan Sertifikasi tenaga syariat.

4. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Syariat Islam.

Program ini bertujuan mengembangkan dan meningkatkan SDM pelaksana sayariat islam. Keberhasilan pelaksanaan syariat islam sangat tergantung kepada profesionalisme aparaturnya. Maka untuk pencapain program tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas imuem meunasah, Sosialisai qanun pelaksanaan syariat kepada lembaga pendidikan, dan pembinaan remaja mesjid



5. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Program ini bertujuan untuk menurunkan jumlah dan pertumbuhan para fakir miskin, pekerja migran, KAT, dan PMKS lainnya sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera Program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping social, Pemberdayaan Keterampilan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT).

6. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial penyandang cacat, anak terlantar, anak korban penyalahgunaan NAPZA, gelandangan dan wanita rawan social ekonomi. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan social, Penyusunan Kebijakan Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Koordinasi Perumusan Kebijakan & Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan, Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa,



Pelaksanaan KIE Konseling & Kampanye Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan.

7. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi, kemauan dan kemampuan penyandang cacat dan eks trauma dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan Pemberdayaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma dan eks kusta.

8. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo.

Untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan panti asuhan dan panti jompo serta terpenuhinya kebutuhan fisik, jasmani dan sosial bagi penghuni panti sosial. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Panti Jompo, Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo, Pendidikan dan Pelatihan Cacat Netra, Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo, Pendidikan dan Pelatihan bagi Remaja Putus Sekolah.

9. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan social guna terwujudnya masyarakat yang memiliki kemampuan bekerja sama, terampil dan berwawasan . Untuk mewujudkan program tersebut dapat diimplementasikan melalui



kegiatan-kegiatan yaitu Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku UKS Masyarakat, Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial, Fasilitasi Kerjasama Usaha antar Pemda dengan Organisasi/ Lembaga Sosial Masyarakat, Pelatihan Keterampilan Taruna Penanggulangan Bencana (Tagana), Pemberdayaan Karang Taruna, Pelatihan petugas penyuluhan sosial dan penyuluhan sosial keliling.

10. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Program ini bertujuan menciptakan koordinasi dan sinkronisasi program yang representative dalam perencanaan di bidang sosial budaya. Program ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya; Koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan; Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan, perencanaan pembangunan yang responsive jender, koordinasi perencanaan pembangunan syariat islam.

11. Program pengembangan nilai budaya.

Program ini bertujuan untuk mempertahankan, memelihara serta mengembangkan budaya warisan leluhur yang ada sehingga secara berlanjut dapat terus dinikmati dan dihayati. Program ini implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, Pelatihan upacara adat, Peringatan



hari kesenian daerah dan anugerah seni, dan Pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat.

12. Program pengelolaan kekayaan budaya.

Program ini bertujuan untuk mengelola, mensosialisasi dan mengolah keanekaragaman kekayaan budaya daerah. Program ini implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno, dan Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal/Daerah, dan Pelatihan kesenian bagi guru dan pelatihan sanggar.

13. Program pengelolaan keragaman budaya.

Program ini bertujuan untuk memelihara dan membina serta mengelola keanekaragaman budaya dan lembaga adat istiadat yang telah terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat, melalui kegiatan dialog kebudayaan dan mensosialisasikan budaya Daerah. Program ini dapat implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, Penyelenggaraan dialog kebudayaan, dan Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal.

14. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas perempuan dan anak melalui perlindungan dan pengetahuan tentang hukum. Banyak kasus yang menimpa para perempuan dan anak yang berdampak



kepada keterbelakangan peran dan fungsi mereka dalam kehidupan.

Program ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan KDRT, dan Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

15. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Program ini dapat terwujud dengan diimplementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu Peningkatan kapasitas perempuan perajin, Pendidikan politik bagi perempuan, Pelatihan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga korban konflik dan dhuafa, Pelatihan manajemen dan keterampilan bagi kelompok perempuan pengusaha kecil

16. Program penguatan kelembagaan pengurusanutamaan gender dan anak.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penguatan kelembagaan gender dan anak. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG), Sosialisasi akte kelahiran gratis, Penguatan kelembagaan pengurusanutamaan gender dan anak, Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.



17. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan objek wisata Aceh melalui penyelenggaraan event-event promosi pariwisata pada masyarakat dan wisatawan. Program ini implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata, dan Pengembangan cendera mata khas Meureudu.

18. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata Aceh sehingga tersebar informasi dan pengenalan wilayah objek wisata dan terwujudnya kesadaran masyarakat khususnya remaja terhadap perkembangan wisata. Program ini implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu pengembangan objek pariwisata unggulan, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha, Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi, dan Pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata.



19. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan. Program ini implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Pembinaan organisasi kepemudaan, Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda, Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda, Pameran prestasi hasil karya pemuda, Pelatihan kepemimpinan/pemuda pelopor pedesaan, Peringatan hari sumpah pemuda tingkat Kabupaten, Pemilihan dan pelatihan paskibraka tingkat Kabupaten,. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pemuda.

20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini bertujuan Untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat dan anak didik melalui peningkatan kegiatan olahraga, termasuk olahraga masyarakat, penyandang cacat dan olahraga tradisional, peningkatan prestasi olahraga dan pemanfaatan IPTEK olahraga, terselenggaranya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga, serta terselenggaranya kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan. Program ini implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, Penyelenggaraan kompetisi olah raga, Pemberian



penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi, Pembibitan cabang olah raga prestasi di tingkat daerah, Pengelolaan dapur umum diklat SMA plus diklat olahraga, Penyelenggaraan POPDA, dan pemberangkatan atlet, Olahraga dalam rangka HAN, Pelaksanaan perlombaan lari 10 KM, Pelaksanaan turnamen/kompetisi olah raga antar lembaga/instansi, Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat, dan Penunjang dan pembinaan kelembagaan.

21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Program ini bertujuan Untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah. Program ini implementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga.

22. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perdamaian, pemahaman akan hak dan kewajiban berpolitik, kualitas berkomunikasi serta kontrol politik masyarakat dalam membangun karakter bangsa yang demokratis. Program ini implementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, Koordinasi forum-forum



diskusi politik, Koordinasi pembinaan infrastruktur politik, Sosialisasi politik damai Aceh, dan Sosialisasi kebijakan politik pemerintah.

23. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Program ini bertujuan menciptakan rasa aman, kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar yang mungkin terjadi. Program ini implementasikan melalui kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan lingkungan.

24. Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Program ini bertujuan Untuk meningkatkan aktifitas pengkajian/analisis dilingkungan kesbang dan linmas terhadap sistem kondisi keamanan daerah, terbentuknya forum kewaspadaan dini masyarakat, serta tercegahnya gangguan keamanan Program ini implementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.

25. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Program ini bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan terhadap beberapa kelompok masyarakat mahasiswa, siswa, PNS dan warga masyarakat lainnya dalam mengantisipasi ancaman dan



tantangan terhadap keutuhan NKRI serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Program ini implementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Sosialisasi dan peningkatan pembauran dan kerukunan umat beragama.

26. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat sehingga terciptanya rasa nasionalisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Program ini implementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, Pemantapan ideologi dan bela Negara, Fasilitasi peningkatan pemahaman hak asasi manusia.

5.6 PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH YANG BERBASIS TEKNOLOGI, POLITIK DAN HUKUM.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan harapan yang dapat dirasakan dan dimiliki dalam tatanan pemerintahan jika dikelola dengan baik. Pemerintahan merupakan lembaga eksekutif yang mengurus dan melayani seluruh kepentingan masyarakat secara efektif dan berkualitas. Untuk membangun sebuah



kelembagaan yang baik harus didukung dengan infrastruktur dan SDM yang andal dan berani mengambil resiko. Maka untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah merencanakan program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2010 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan meningkatkan penyediaan peralatan dan perlengkapan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, mengakomodir berbagai kebutuhan barang unit sesuai kapasitas aparatur serta pemberian honorarium untuk tenaga non PNS. Program ini terlaksana dengan baik melalui kegiatan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa administrasi keuangan, Pengadaan ATK, Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan buku bacaan, penyediaan makan dan minum, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

2. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan public, meningkatkan citra aparatur pemerintah dan kepercayaan masyarakat untuk menjadi semakin positif; serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan



pembangunan daerah. Program ini dapat terlaksana melalui kegiatan yaitu Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu, Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu, Monitoring tim instansi terkait perizinan/non perizinan Daerah, Penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan.

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Program ini dibagi dalam beberapa kegiatan antara lain yaitu dialog atau audiensi dengan tokoh masyarakat, Rapat koordinasi Muspida, Rapat kerja bupati, Peningkatan Pelayanan/Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kunjungan Kerja/Inspeksi kepala daerah/Wakil Kepala daerah.

4. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program ini bertujuan untuk menentukan adanya kejelasan batas wilayah administrasi pemerintahan, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemda dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, mengumpulkan data informasi penyelenggaraan otonomi daerah yang lengkap dan akurat, penyusunan LPPD, menyelesaikan penyerahan P3D, melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan urusan dekonsentrasi dan



tugas pembantuan. Program ini diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan antara adalah Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah, Koordinasi dan pematapan pemerintah daerah dan kecamatan, Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah

5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini bertujuan untuk menertibkan administrasi tanah bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Program ini dibagi dalam beberapa kegiatan antara lain yaitu peningkatan pensertifikatan tanah milik masyarakat miskin, penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.

6. Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kependudukan dan catatan sipil, meningkatkan kemampuan aparatur catatan sipil yang professional, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya akte kelahiran dan asuransi tenaga kerja; serta meningkatkan kedisiplinan administrasi kependudukan. Program ini dibagi dalam beberapa kegiatan antara lain yaitu Peningkatan kapasitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil Monitoring, evaluasi dan koordinasi kependudukan dan catatan sipil, Sosialisasi pembuatan akte kelahiran dan akte kematian, Monitoring dan



evaluasi pelaksanaan asuransi tenaga kerja, Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kependudukan, Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

7. Program Pembinaan Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan aparatur pemerintahan kabupaten dan gampong. Program ini dibagi dalam beberapa kegiatan antara lain yaitu Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong, Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, Fasilitasi penyusunan qanun kab/kota tentang pemerintah mukim dan pemerintahan gampong, Pembekalan tugas-tugas sekretaris gampong yang diangkat Menjadi PNS, Pembekalan tugas tuha peut gampong, Raker keuchik/kepala gampong, Raker imum mukim, Manajemen pemerintahan gampong, Manajemen pemerintahan mukim, Pembinaan dan pendataan potensi pemerintahan gampong.

8. Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah kepada public secara tranparan dan akuntabel, sarana perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Program ini dilaksanakan pada



kegiatan Pembinaan dan pengembangan dengan pers dan masyarakat.

9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini bertujuan untuk menyusun rancangan qanun, mewujudkan landasan hukum bagi aparatur pemerintah, meningkatkan pemahaman berbagai peraturan perundang-undangan bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi aparatur pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan yaitu Publikasi peraturan perundang-undangan, Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, Bimbingan teknis penyuluhan hokum, penyusunan peraturan bupati tentang tupoksi, Rancangan aksi nasional tentang HAM, Peningkatan pelayanan bantuan hokum, Pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan dapat terwujud melalui Penyusunan LPPD Bupati, Penyusunan LKPJ Bupati, Penataan Kelembagaan Aparatur dan Aparatur Pemerintahan Mukim, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Gampong, Pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan Pidie Jaya.



11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program ini dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan kinerja, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

12. Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian KDH. Program ini dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, Pengendalian manajemen kebijakan KDH, Pengendalian kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya, Inventarisasi temuan pengawasan, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.

13. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.



14. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Program ini dilaksanakan pada kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBK,

15. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan pada kegiatan antara lain yaitu Pembinaan kelembagaan sumber daya air (WISMP), Peningkatan Kemampuan Teknis Sumber Daya Perencana, Bimbingan teknis tenaga perencanan

16. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan berikut yaitu Penyusunan dan penerbitan naskah sumber, Penyediaan sarana layanan informasi, dan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan pemerintah dan swasta.

17. Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Program ini dilaksanakan



pada beberapa kegiatan sebagai berikut Rapat-rapat paripurna, Kegiatan Reses, Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dan Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

18. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan formal; menyebarluaskan peraturan perundang-undangan; menyelenggarakan bimbingan teknis implementasi perundang-undangan; menyelenggarakan pembinaan mental dan fisik aparatur; menyusun qanun sebagai peraturan pelaksanaan Undang Pemerintahan Pusat, menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan perumusan kebijakan kepala daerah, meningkatkan profesionalisme auditor dan aparatur pengawasan, mendapatkan informasi dan data kelembagaan kab/kota; serta meningkatkan kompetensi pengelola unit pelayanan publik. Program ini dibagi dalam beberapa kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah, Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah, Pendidikan dan pelatihan formal, Sosialisasi peraturan perundang-undangan, Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan, Pembinaan mental dan fisik aparatur, Rapat koordinasi teknis (RAKORNIS), Bimbingan teknis penyusunan perumusan kebijakan kepala daerah, Peningkatan kualitas pelayanan public, Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah, Pembinaan



pelaksanaan analisis jabatan perangkat daerah, Pengelolaan perpustakaan satuan kerja, Pengembangan akuntabilitas instansi pemerintah, Pengembangan indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan perangkat daerah, Fasilitas penyusunan dan penyiapan dokumen AKIP, Penataan kelembagaan satuan kerja perangkat Daerah, dan Pembinaan teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja.

19. Program Pendidikan Kedinasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan dalam Aceh serta meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme PNS. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan berikut yaitu Pendidikan dan pelatihan teknis, Pendidikan penjenjangan structural dan Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme.

20. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur pemerintahan daerah. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan yaitu Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabus, penyusunan modul, penyusunan pedoman



diklat), Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan Pelaksanaan pendataan PNS.

21. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan yaitu Pengurusan administrasi belanja daerah dan pelaporan, Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Perbantuan, dan Peningkatan Pengelolaan Dokumen Anggaran Daerah.

22. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah serta melakukan sinkronisasi dan sinergi program pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan pada kegiatan Sinkronisasi dan Sinergi Program Pembangunan.

23. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Program ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian dan iptek yang bermanfaat dan berdayaguna bagi perencanaan pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan pada kegiatan yaitu Pengembangan Sistem Manajemen Data, Pelaporan dan Evaluasi Data Pembangunan daerah, dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD.



24. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan hukum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan sosialisasi undang-undang pemilu Program ini di implementasikan dalam kegiatan sosialisasi undang-undang di bidang pemilu.

25. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi dan Komunikasi

Program ini bertujuan untuk mengelola data dan informasi mengenai pemilu/Pilkada yang akurat, tepat dan transparan. Program ini di implementasikan dalam kegiatan Pengelolaan data informasi dan supervisi teknologi informasi.

26. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya data dan informasi pembangunan yang lengkap dan akurat sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan berikut yaitu Pengumpulan updating dan analisis data informasi, Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan. Penyusunan profile Pidie Jaya Dalam Angka, Penyempurnaan geodata special base dan penerapan standarisasi data spasial (clearing data).



27. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk menghasilkan data hasil pembahasan sinkronisasi dan sinergi program pembangunan Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya acuan program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan berikut yaitu Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan (RAD-PK) Penyelenggaraan Musrenbang Daerah, Penyusunan rancangan RKPK, Penyelenggaraan Musrenbang RKPK, Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah Daerah, Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Penyusunan KUA dan PPAS, Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan.

Lebih jelasnya berbagai rencana program dan kegiatan masing-masing bidang prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2010 dapat dilihat pada lampiran.



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kegiatan Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009–2014 dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010. Dari pencermatan jangka waktu rencana, RKPK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 bersifat relatif sangat strategis, karena merupakan rencana tahunan Perdana Kepala Daerah terpilih, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan sangat menentukan pula keberhasilan dari Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya.

Di lain pihak, dalam kurun waktu perjalanan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya 2009-2014, diketahui bahwa berbagai macam ketentuan hukum atau kerangka regulasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Diantara kerangka regulasi yang ada, hal yang cukup menimbulkan perdebatan panjang adalah berkenaan dengan persoalan pembagian bidang kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Tuntutan kejelasan kewenangan ini sangat mengemuka dalam proses penganggaran, sebagaimana dituntut oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

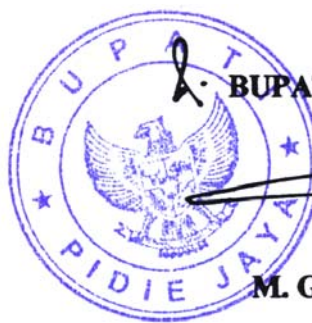
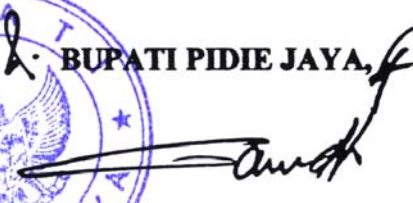
Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan RKPK Tahun 2010 tentu saja akan memerlukan langkah-langkah taktis strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pidie Jaya dan seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan dalam RKPK Tahun 2010, dengan sebaik-baiknya.
2. Sebagai pedoman penyusunan RAPBK, RKPK perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana akan memerlukan perumusan tentang pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar tidak menimbulkan bias dalam pengorganisasian anggaran yang berbasis Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dalam upaya sinkronisasi/sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBN, APBA, APBK, Otsus dan Tambahan Bagi Hasil Migas serta sumber pendanaan lainnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib



membuat Rencana Kerja yang dapat menggambarkan sinergisitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.

4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperanserta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/ kegiatan melalui upaya koreksi atau perbaikan apabila diperlukan.

 **BUPATI PIDIE JAYA,**

M. GADE SALAM

MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010
SUMBER DANA APBK

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
1	Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal yang berkualitas	Program pendidikan anak usia dini;	Tersedianya fasilitas pendidikan anak usia dini yang memadai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
		Pembangunan gedung PAUD			240.000.000
		Pengadaan fasilitas bermain			76.000.000
		Pengadaan Alat praktik dan alat peraga			65.000.000
		Pengadaan dan pemeliharaan meubileur sekolah			45.000.000
		Pengadaan perlengkapan sekolah			62.000.000
		Pemberian Bantuan opsional PAUD			125.000.000
		Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan, tersedianya sarana dan prasarana dan terselenggaranya pendidikan wajib belajar sembilan tahun yang efektif dan berkualitas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
		Pembangunan gedung sekolah			1.243.000.000
		Pengadaan buku, alat praktik dan alat peraga			236.000.000
		Pengadaan dan pemeliharaan meubileur sekolah			120.000.000
		Pengadaan perlengkapan sekolah			89.000.000
		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik			32.000.000
		Bantuan operasional sekolah SD/MI dan SMP/MTs			993.000.000
		Pembinaan kelembagaan sekolah			21.500.000
		Penyelenggaraan Paket B setara SMP			13.000.000
		Penyelenggaraan UN dan UAS			21.000.000
		Pelatihan Pelaksanaan MBS		32.100.000	
		Pelatihan penyusunan KTSP		42.000.000	
		Penyelenggaraan akreditasi Sekolah Dasar		12.000.000	
Penyelenggaraan olimpiade mata pelajaran		36.000.000			
Program pendidikan menengah;	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan, tersedianya sarana dan prasarana dan terselenggaranya pendidikan menengah yang efektif dan berkualitas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga			
Pembangunan gedung sekolah			569.200.000		
Pengadaan Buku, alat praktik dan alat peraga			342.000.000		
Pengadaan dan pemeliharaan meubileur sekolah			167.500.000		
Pengadaan perlengkapan sekolah			82.000.000		
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik			43.250.000		
Bantuan operasional sekolah SMA/MA/SMK		667.000.000			
Pembinaan kelembagaan sekolah		23.000.000			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Penyelenggaraan Paket C setara SMA			19.500.000
		Penyelenggaraan UN dan UAS			28.900.000
		Pelatihan Pelaksanaan MBS			32.900.000
		Pelatihan penyusunan KTSP			32.450.000
		Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah			11.806.000
		Lomba siswa berprestasi			14.500.000
		Penyelenggaraan olimpiade bidang studi			22.500.000
		Program pendidikan non-formal	Terselenggaranya pendidikan non formal secara efektif, efisien dan berkualitas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
		Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal			34.000.000
		Pengembangan kurikulum pendidikan dayah			21.600.000
		Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal			123.000.000
		Pembangunan pendidikan non formal			345.200.000
		Akreditasi pendidikan dayah			12.000.000
		Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
		Pelaksanaan sertifikasi guru			65.000.000
		Uji kompetensi bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi			98.000.000
		Pembinaan KKG dan MGMP			156.000.000
		Pengembangan system pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan			54.000.000
		Perlombaan guru dan Kepala Sekolah berprestasi			125.000.000
		Perlombaan Inovasi pembelajaran bagi tenaga pendidik			76.500.000
		Program manajemen pelayanan pendidikan.	Terwujudnya sistem pengawasan pendidikan yang andal dan berkualitas secara intensif dan berkelanjutan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
		Supervisi Pengawasan Satuan Pendidikan			55.000.000
		Pembinaan UKS			32.000.000
		Peringatan Hardiknas dan HUT PGRI			65.950.000
		Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang issue pendidikan			56.000.000
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan			45.000.000
	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	Program pembangunan jalan dan jembatan ;	Terbangunannya jalan dan jembatan secara baik sesuai dengan speknya dan bermutu	Dinas PU	
		Perencanaan Pembangunan Jalan			589.200.000
		Pembangunan jalan			3.344.000.000
		Perencanaan Pembangunan jembatan			814.000.000
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			354.800.000
		Program pembangunan turap / talud / bronjong ;	Terbangunnya talut/turap dalam penanganan saluran air limbah dan erosi		

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong/Tebing Sungai			646.650.000
		Pembangunan turap/talud/bronjong/Tebing Sungai			1.555.000.000
		Pengawasan Pembangunan turap/talud/brojong/Tebing Sungai			46.650.000
		Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan ;	Terpeliharanya jalan dan jembatan secara baik dan dapat membantu teraksesnya perekonomian masyarakat		
		Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Bagian Bina Marga			2.312.500.000
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Bagian Bina Marga			4.400.000.000
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Bina Marga			185.500.000
		Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat Bagian Cipta Karya			204.580.000
		Program rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong ;			
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan ;			
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawa dan jaringan pengairan lainnya ;	Terbangunnya pengelolaan jaringan irigasi, saluran sungai secara efektif dan berkesinambungan		
		Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai			8.700.000
		Pelaksanaan normalisasi saluran sungai			290.000.000
		Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi			5.435.000.000
		Pegawasan Pembangunan Jaringan Irigasi			43.000.000
		Pengawasan Perencanaan normalisasi saluran sungai			8.700.000
		Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi			115.500.000
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Lainnya			122.986.800
		Jasa Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi			115.500.000
		Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terwujudnya pengembangan konservasi sungai, dan tersedianya sarana dan prasarana air minum masyarakat		
		Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan			185.686.800
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			1.300.000.000
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Cipta Karya			254.440.000
		Program Pembangunan infrastruktur pedesaan	Terbangunnya infrastruktur pedesaan yang baik dan berkualitas		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Pedesaan			5.490.091.200
		Perencanaan Jalan Dan Jembatan Pedesaan			152.102.000

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana dan prasarana air Minum Perkotaan			600.000.000
		Pembangunan MCK Pedesaan			800.000.000
		Perencanaan Pembangunan MCK Pedesaan			24.000.000
		Pengawasan Pembangunan MCK Pedesaan			24.000.000
		Pengawasan Jalan dan Jembatan Pedesaan			152.102.000
		Program Penataan pembangunan infrastruktur perkotaan	Tersedianya sistem penataan infrastruktur perkotaan dari sistem pemeliharaan dan peningkatan jalan		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Tata Ruang			27.000.000
		Perencanaan pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Perkotaan			125.000.000
		Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Perkotaan			2.084.500.000
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan			75.300.000
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Perkotaan Bagian Tata Ruang			732.000.000
		Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Perkotaan Bagian Tata Ruang			46.000.000
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			36.000.000
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Tata Ruang			23.500.000
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Bagian Tata Ruang			11.500.000
		Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur			199.300.000
		Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan			12.900.000
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Jalan Bagian Tata Ruang			7.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang			120.000.000
		Perencanaan Survey dan Pemetaan Wilayah Kecamatan			40.000.000
		Survey dan Pemetaan Wilayah Kecamatan			600.000.000
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Tata Ruang			60.000.000
		Perencanaan pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Perkotaan			85.000.000
		Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Perkotaan Bagian Tata Ruang			40.000.000
		Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan			35.000.000
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			40.000.000
		Program Peningkatan Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya persediaan fasilitas perhubungan dalam rangka kelancaran arus lalu lintas		

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi	1.298.000.000
		Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya			155.000.000
		Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan			63.312.000
		Penunjang Perparkiran Roda 2 dan 4			100.000.000
		Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Terbangunnya marka jalan		
		Pengadaan marka jalan			165.000.000
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sistem pengelolaan persampahan yang optimal	Kantor Lingkungan Hidup	
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			56.000.000
		- Perencanaan Pembangunan TPA & Jalan ke TPA Desa Reungkoum (2011)			56.000.000
		Pengembangan teknologi pengolahan persampahan			37.667.000
		- Perencanaan Pengadaan alat-alat Daur Ulang Sampah			6.000.000
		- Pengawasan Pengadaan alat-alat Daur Ulang Sampah			6.000.000
		- Operasional Kegiatan Pengadaan alat-alat Daur Ulang Sampah			3.000.000
		- DAU (10 % Sharing DAK)			16.667.000
		- Perencanaan Pengadaan alat-alat Daur Ulang Sampah (2011)			6.000.000
		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan		
		Pemantauan Kualitas Lingkungan			230.000.000
		- Perencanaan Pembangunan Gedung Lab. & Mobile Lab. Lingkungan Hidup			36.000.000
		- Pengawasan Pembangunan Gedung Lab. & Mobile Lab. Lingkungan Hidup			27.000.000
		- Operasional Kegiatan Pembangunan Gedung Lab. & Mobile Lab. Lingkungan			27.000.000
		- DAU (10 % Sharing DAK)			100.000.000
		- Pembuatan Sumur Resapan (APBK)			40.000.000
		Pengkajian Dampak Lingkungan (DAS) Krueng Meureudu			40.000.000
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terciptanya perlindungan dan konservasi SDA		45.000.000
		Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- sumber Air			45.000.000
		Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam & lingkungan	Meningkatkan kualitas informasi yang dapat diakses oleh masyarakat tentang SDA dan Lingkungan		39.500.000

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pengembangan data dan informasi lingkungan hidup (pemasangan Papan Infor Masi sadar Lingkungan)			39.500.000
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya pengendalian polusi udara dalam usaha pnyegaran kondusi lingkungan		497.866.094
		Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yg menimbulkan polusi			497.866.094
		- Pembangunan MCK sebanyak 6 unit			
		Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Terkelolanya ekosistem daerah pesisir secara baik melalui penghijauan daerah pesisir		37.667.000
		Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut			37.667.000
		- Perencanaan Penanaman Pohon Cemara Laut			6.000.000
		- Pengawasan Penanaman Pohon Cemara Laut			4.500.000
		- Operasional Kegiatan Penanaman Pohon Cemara Laut			4.500.000
		- DAU (10 % Sharing DAK)			16.667.000
		- Perencanaan Penanaman Pohon Cemara Laut (2011)			6.000.000
	Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat	Program obat dan perbekalan kesehatan;	Tersedianya obat bagi masyarakat yang mencukupi	Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			753.800.000
		Program upaya kesehatan masyarakat;	Meningkanya pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal		
		Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan			235.764.250
		Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial			1.425.673.000
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat			75.321.000
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan			145.278.500
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa			85.345.250
		Program pengawasan obat dan makanan;	Terlaksanan sistem pengawasan obat dan makanan secara optimal dan berkualitas		
		Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyrakat di bidang Obat dan Makanan			96.324.500
		Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya			76.534.250
		Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum Di bidang Obat Dan Makanan			56.325.400
		Program perbaikan gizi masyarakat;	Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat dalam usaha penanggulangan gizi buru		
		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKI);			74.356.300
		Program pengembangan lingkungan sehat;	Terbangunnya kondisi lingkungan yang sehat dan berseri		

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat			87.542.500
		Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat			43.563.800
		Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Terpromosinya kesehatan dan pola pemberdayaan masyarakat.		
		Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat			75.483.500
		Penyuluh Masyarakat Pola Hidup Sehat			85.430.500
		Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan			35.672.500
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;	Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dalam lingkungan masyarakat		
		Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk			22.865.000
		Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging			12.063.000
		Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah			26.750.000
		Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular			52.876.500
		Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik			28.800.000
		Peningkatan Imunisasi			15.900.000
		Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah			13.105.000
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			4.656.000
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan		
		Pembangunan dan pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan			76.325.000
		Penyelenggaraan Standarisasi Tenaga Pelayanan Kesehatan Teladan			40.000.000
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;	Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin secara merata dan optimal		
		Pengobatan Gratis Operasi Katarak			40.000.000
		Pelayanan Sunatan massal			20.000.000
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;	Terbangunnya pusat pelayanan masyarakat secara baik dan terpadu		
		Pembangunan Puskesmas			
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat			
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;	Terbangunnya rumah sakit dan tersedianya obat-obatan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat		
		Pembangunan Rumah Sakit			4.004.000.000
		Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit			720.000.000

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit			4.514.400.000
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit			
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;			
		Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita			65.382.000
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat			
		Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Hasil Industri Rumah Tangga			35.678.000
		Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Restoran			43.276.100
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;			
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.			
		Penyuluhan Keselamatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu			25.500.000
		Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak			19.890.000
		Pembangunan fasilitas kesehatan Poskesdes			
		Program keluarga berencana;			
		Program kesehatan reproduksi remaja;			
		Program pelayanan kontrasepsi;			
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;			
		Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;			
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; dan			
	Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komoditi unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan	Program peningkatan kesejahteraan;			76.439.000
		Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;			82.543.000
		Program peningkatan kesempatan kerja; dan	Meningkatnya informasi pelayanan masyarakat tentang peluang dan lapangan kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Penyebarluasan informasi tenaga kerja			21.450.000
		Kerjasama pendidikan dan pelatihan			53.481.000
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terwujudnya perlindungan dan jaminan hukum bagi tenaga kerja		
		Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan			76.350.000
		Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan			83.260.000

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri ;			
		Transmigrasi Lokal	Tersedianya daerah pemukiman baru dalam usaha perluasan wilayah transmigrasi lokal		200.000.000
		Penyuluhan Transmigrasi Lokal			75.000.000
		Pelatihan Transmigrasi Lokal			50.000.000
		Pembinaan Transmigrasi Lokal			75.000.000
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan tandus sebagai lahan produktif	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	320.000.000
		Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan RHL (DBH-SDA)			110.440.000
		Kegiatan Pengembangan Hutan Pantai			209.560.000
		Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan			200.000.000
		Kegiatan Pengembangan Hutan Masyarakat adat			200.000.000
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			387.322.494
		Kegiatan SPLHT Tanaman Kakao			350.000.000
		Kegiatan Peningkatan SDM Perkebunan			37.322.494
		Program Peningkatan Pertanian / Perkebunan			200.000.000
		Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			
		- Kegiatan Demplot Rehabilitasi Tanaman Kakao Rakyat			200.000.000
		Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya hasil produksi pertanian dan perkebunan melalui pengembangan kebun karet		1.416.326.750
		Pengembangan Kebun Karet Rakyat (DAK)			1.253.386.250
		- Sharing (DAU)			125.338.625
		- Administrasi			37.601.875
		Peningkatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya desa mandiri dalam meningkatkan ketahanan pangan		173.773.000
		Pengembangan Desa Mandiri Pangan			173.773.000
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian		Dinas Pertanian dan Peternakan	1.647.956.100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian (DAK)			1.421.729.100
		Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna (Sharing IDB)			124.147.500
		Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna (Sharing WISMP)			102.079.500
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terlaksananya pencegahan penyakit hewan ternak yang menular secara efektif dan optimal		250.000.000
		Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak			250.000.000
		Peningkatan Kesejahteraan Petani			1.180.000.000

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pengembangan Agribisnis Peternakan			1.180.000.000
		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			50.000.000
		Pembibitan dan Perawatan Ternak			50.000.000
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya keesejahteraan petani dengan penyuluhan dan pendampingan		40.000.000
		Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis			40.000.000
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan			1.338.892.000
		Penanganan daerah rawan pangan		Dinas Penyuluhan dan Tanaman Pangan	40.000.000
		Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan			40.192.000
		Pengadaan Sarana Kerja Penyuluh Pertanian (DAK + DAU)			
		- DAK			1.067.000.000
		- Pendamping (DAU)			106.700.000
		- Penunjang Kegiatan (DAU)			85.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Terberdayanya masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan		974.205.807
		Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengaman SD Kelautan			30.000.000
		Identifikasi dan Penangkaran Ikan			944.205.807
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Terwujudnya budidaya perikanan yang andal dan bermutu melalui pengembangan bibit unggul	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.666.000.000
		Pengembangan Bibit Ikan Unggul			250.000.000
		Pembinaan dan Pengembangan Perikanan			1.416.000.000
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Tersedianya fasilitas pembangunan tempat usaha perikanan msyarakat		1.481.900.000
		Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan			1.303.900.000
		Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap			178.000.000
		Program Perlindungan Konsumen dan Perdagangan		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	20.000.000
		Operasional Dan Pengembangan UTTP Kemetrolgian			20.000.000
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			120.000.000
		Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri			120.000.000
		Program Peningkatan Kulaitas Kelembagaan Koperasi			140.378.400
		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi			140.378.400
		Program Peningkatan Efisiensi Dalam Negeri			2.006.000.000
		Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang Produk			2.006.000.000

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Terwujudnya fasilitasi dan pembinaan bagi pedagang kaki lima dan asongan dalam masyarakat		63.063.000
		Fasilitasi Modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan			63.063.000
	Pembinaan wawasan keislaman dan pelaksanaan syariat islam secara berkelanjutan dan berkeadilan serta pembangunan sosial budaya.	Program Pengembangan Sistem Informasi	Tersedianya pelayanan informasi syariat bagi masyarakat melalui pamflet dan pemberian buku bacaan	Dinas Syariat Islam	80.015.900
		Pembuatan Uraian Qanun (Pamflet)			44.028.400
		Penyediaan Buku Agama dan Kitab Kepustakaan Majelis Ta'lim			35.987.500
		Program Peningkatan Kelembagaan Syariat Islam			70.000.000
		Pengembangan Gampong Model Bersyariat Islam			40.000.000
		Monitoring Aparatur Pelaksana Syariat Islam			30.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Aparatur Syariat Islam	Meningkatnya kapasitas aparatur melalui sosialisasi pelaksanaan syariaat bagi masyarakat		104.755.000
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imam Meunasah			25.000.000
		Sosialisasi Qanun Pelaksana Syariat Islam Kepada Lembaga Pendidikan			44.755.000
		Pembinaan Remaja Mesjid Kecamatan			35.000.000
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terwujudnya peranserta pemuda dalam menanggulangi kasus narkoba secara optimal		20.502.350
		Penyuluhan, Pencegahan penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	20.502.350
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			65.000.000
		Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dlm olahraga			20.000.000
		Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah			25.000.000
		Pembinaan Organisasi Olahraga Pemuda			20.000.000
		Program peningkatan peran serta kepemudaan;			
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;			
		Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga.			
		Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;	Terbangunnya pemberdayaan masyarakat miskin dan kesejahteraan sosial melalui keterampilan usaha		
		Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin			76.800.000
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;		Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Trasmigrasi	
		Program pembinaan anak terlantar;			
		trauma;			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pendayagunaan para penyandang cacat dan ekstrauma			45.970.000
		Program pembinaan panti asuhan/panti jompo;	Terciptanya peningkatan kapasitas penghuni santri melalui pelatihan		
		Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti			43.520.000
		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;			
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; dan			
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			275.869.758
		Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi			160.869.758
		Pengadaan Alat Studio Komunikasi			65.000.000
		Pengembangan Sistem Informasi		Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika	50.000.000
		Kerjasama informasi dan media massa	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah secara efektif dan transparan		131.300.000
		Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah			
		Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			88.100.000
		Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat			43.200.000
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata daerah		
		Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata			123.000.000
		Program Pengembangan Kemitraan			
		Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata			100.000.000
		Program Pengembangan Nilai Budaya			
		Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika	65.950.000
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terkelolanya keragaman budaya melalui festival dan seni budaya daerah		
		Pengembangan Seni dan Budaya			161.765.000
		Festival Lagu Aceh dan Publikasi Kegiatan Budaya			43.202.250
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan	Badan Kesbang Linmas	
		Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan			31.258.000
		Siskamswaskarsa di Daerah			
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Fasilitas Operasional BRA			258.309.500
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya kemitraan yang baik dan efisien dalam meningkatkan wawasan kebangsaan	Badan Kesbang Linmas	
		Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan			115.487.400
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan		Badan Kesbang Linmas	
		Pembentukan satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat			171.925.850
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran		Badan Kesbang Linmas	
		Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran			54.376.125
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya Kebakaran			326.620.000
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran			27.000.000
		Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran			37.368.000
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran			713.002.125
		Program Keluarga Berencana	Terwujudnya pelaksanaan keluarga berencanan dengan pemnyaluran kontrasepsi secara baik dan tepat sasaran	BKBPP	
		Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin			
		- Pengadaan alat kontrasepsi (DAK)			630.000.000
		- Dana pendamping DAK			37.800.000
		Pengadaan mobil pelayanan KB (DAK)			540.000.000
		Operasional pelaksana petugas lapangan (PLKB relawan)			42.000.000
		Sosialisasi KB pria bagi Toga dan Toma			17.500.000
		TNI manunggal KB Kesehatan (TMKK)			15.000.000
		Pelayanan KIE			54.000.000
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Terlaksananya kesehatan reproduksi remaja		
		Lomba PIK KRR tingkat kabupaten			12.540.000
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR			4.000.000
		Operasional pusat informasi PIK KRR kabupaten			4.000.000
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		BKBPP	
		Operasional PPKBD			199.800.000
		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan dan pembinaan keluarga sejahtera	BKBPP	

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pendampingan bagi kegiatan kelompok UPPKS			12.000.000
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			
		Sosialisasi undang-undang penghapusan KDRT			25.190.000
		Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan			96.500.000
		Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak		BKBPP	
		Sosialisasi qanun perlindungan anak			25.000.000
		Peningkatan SDM Kelembagaan Perlindungan perempuan dan anak			35.000.000
		Pembinaan gampong Peningkatan Peranan wanita dan keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI)			37.000.000
	Penguatan kelembagaan Pemerintah yang berbasis teknologi, Politik dan hukum	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap masyarakat secara efektif dan efisien	Sekretariat Daerah	
		Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan			784.000.000
		Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri			532.000.000
		Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA			653.000.000
		Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya			235.000.000
		Peringatan HUT Kab. Pidie Jaya			123.000.000
		Program pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya fasilitas pelayanan perkantoran yang maksimal	Seluruh SKPK	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			245.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.234.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			885.000.000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			442.000.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			216.000.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor			437.850.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			155.300.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			152.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			542.190.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			156.000.000

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			186.000.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman			3.652.000.000
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			854.200.000
		Penyediaan Jasa Kehumasan dan Protokoler			89.700.000
		Penyediaan Jasa Pengamanan			154.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur melalui berbagai pelatihan dan pembinaan	BKPP	
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah			1.432.990.000
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah			532.000.000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			217.000.000
		Seleksi Penerimaan Calon PNS			128.000.000
		Penataan Sistem Administrasi kenaikan Pangkat Otomatis PNS			67.000.000
		Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas			879.000.000
		Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN			65.000.000
		Bimbingan Teknis Kepegawaian, fungsional dan kepemimpinan			155.000.000
		Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul dan Penyusunan pedoman Diklat)			132.000.000
		Pembaharuan Data Kepegawaian (Validasi Data Kepegawaian)			97.500.000
		Penyelesaian Pemindahan/Mutasi PNS dan Penyelesaian SK PNS			78.000.000
		Penyelesaian Daftar Urut Kepangkatan (DUK)			54.000.000
		Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah			86.500.000
		Penyelesaian Pensiun Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen			95.000.000
		Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan			132.800.000
		Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja			43.000.000
		Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas			54.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan Pemerintah secara transparan dan akuntabel		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		SKPK	254.000.000
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)			78.000.000

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Informasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)		Sekretariat Daerah	95.000.000
		Penyusunan Lakip Kabupaten			123.000.000
		Penyusunan Analisis Beban Kerja			86.000.000
		Program Penataan Peraturan PerUndang-undangan	Tersusunnya perundangan daerah secara baik dan berkualitas		
		Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan		Sekretariat Daerah	85.000.000
		Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan			154.000.000
		Publikasi Peraturan Perundang-undangan			67.000.000
		Penataan Perangkat Daerah			65.000.000
		Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tupoksi			189.000.000
		Rancangan Aksi Nasional Hak Azasi Manusia			85.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kualitas aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan gampong		
		Pembekalan Peraturan Pemerintahan Terhadap Perangkat Gampong dan Mukim			78.000.000
		Pemilihan Perangkat Gampong dan Mukim			320.000.000
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tertatanya tapal batas daerah dengan jelas dan akuntabel		
		Pembangunan Tapal Batas Antar Kecamatan dalam Kabupaten			342.000.000
		Program Peningkatan Pelayanan Umum		Sekretariat Daerah	
		Pelaksanaan koordinasi dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas, Badan & Kantor terkait			76.000.000
		Pembinaan monitoring serta evaluasi izin usaha dan gangguan (HO)			95.000.000
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			165.000.000
		Pembinaan Usaha Ekonomi Lemah			327.000.000
		Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah			127.000.000
		Penyusunan Direktori Kegiatan Ekonomi			65.900.000
		Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah			12.600.000.000
		Pelatihan Pemberdayaan Manajemen Dayah (Lanjutan)			43.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor			95.000.000
		Pembinaan dan Pelatihan Remaja Mesjid			34.000.000
		Bimbingan dan Pelatihan Tajhit Manyit			43.000.000
		Program Mengidentifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Teridentifikasinya penanganan pengaduan masyarakat melalui lembaga hukum masyarakat		
		Bantuan Hukum Kepada Aparatur Dan Masyarakat			75.000.000

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya sitem pengelolaan dan pengembangan keuangan daerah	Dinas PPKAD	
		Penyusunan Standar Satuan Harga			173.497.200
		Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah			335.939.245
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD			134.297.025
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD			162.243.380
		Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Perubahan APBD			136.305.880
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD			141.592.564
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			51.349.657
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			93.822.380
		Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			90.689.118
		Pendataan WP, RW dan PBB			109.802.997
		Operasional Pendataan Pajak Dan Restribusi			180.876.670
		Pengelolaan Gaji Pegawai			228.032.500
		Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi			21.785.604
		Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			65.000.000
		Program Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terwujudnya sistem prosedur pengawasan dalam menjaga keuangan daerah	Inspektorat	
		Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan			65.300.000
		Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			97.436.500
		Evaluasi Administrasi Keuangan Pada Dinas , Badan Dan Kantor			325.762.000
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Inspektorat	
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala			280.000.000
		Penanganan kasus pengaduan di Lingkup Pemerintah Daerah			20.000.000
		Tindak Lanjut hasil Temuan Pengawasan			30.000.000
		Pelaksanaan Pengendalian Monitoring Pembangunan Daerah			65.389.500
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur daerah secara berkala dan optimal	Sekeluruh SKPK	
		Pengadaan Mobiler			653.976.500

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional			876.952.500
		Pembangunan Rumah Jabatan			896.432.000
		Pembangunan Gedung Kantor			3.526.879.000
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			762.494.000
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			653.295.000
		Pengadaan Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas			743.695.000
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			653.287.700
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			653.780.000
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			865.300.000
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat secara optimal dan berkesinambungan	Sekretariat DPRK	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			36.000.000
		Hearing/ dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama			164.860.000
		Rapat- rapat Alat Kelengkapan Dewan			203.000.000
		Rapat- rapat Paripurna			301.000.000
		Kegiatan Reses			93.105.000
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah			165.900.000
		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan			200.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			80.000.000
		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRK			1.643.690.000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertatanya sistem administrasi kependudukan melalui kebijakan publik yang efektif dan sesuai dengan SPM	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	712.291.200
		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan			52.449.750
		Pengelolaan Dalam Penyusunan Laporan Administrasi Kependudukan			116.445.000
		Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat			35.505.000
		Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan			61.800.000
		Pengembangan Data Base Kependudukan			247.371.200
		Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil			66.189.750
		Sosialisasi Kebijakan Kependudukan			31.500.000

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			101.030.500
		Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah			
		Program Perencanaan Tata Ruang		Bappeda/PU	
		Penyusunan Rencanan Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK)			400.000.000
		Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan			285.000.000
		Program Pemanfaatan Ruang		Bappeda/PU	
		Survey dan pemetaan			326.130.800
				Bappeda	
		Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan yang valid dan akurat		
		Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi			67.190.000
		Penyusunan Profil Daerah			220.000.000
		Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB			55.000.000
		Operasional Geografis Informasi Sistem (GIS)			114.700.000
		- Penyusunan master plan sistem informasi Pemkab Pidie Jaya berbasis ICT			-
		Penyusunan Pidie Jaya Dalam Angka			110.000.000
		Penyusunan Indek Kemahalan Konstruktif (IKK)			-
		Pengembangan sistem perencanaan pembangunan berbasis TI			500.000.000
		Program Kerja Sama Pembangunan			
		Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah		Bappeda	50.000.000
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan			70.286.313
		koordinasi pembangunan khusus			50.000.000
		Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Bappeda/Dinas PU	
		Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan			200.000.000
		kawasan strategis			435.510.800
		pengawasan ruang			42.074.300
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah secara berkualitas	Bappeda	
		Pembinaan perkuatan (pemberdayaan) kelembagaan sumber daya air (dana pendamping/supporting dan dana pendukung WISMP)			125.376.000
		Peningkatan kemampuan teknis sumber daya perencana			135.000.000
		Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah			-

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Perencanaan Pembangunan Daerah		Bappeda	
		Pengembangan partisipasi dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik			28.456.000
		Penyusunan Rancangan RKPD			50.000.000
		Penyelenggaraan Musrenbang			175.000.000
		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan			9.266.000
		Penyusunan RKT			11.548.000
		Penyusunan KU-APBK			32.000.000
		Penyusunan PPAS			52.000.000
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terlaksanannya koordinasi yang efektif dalam perencanaan ekonomi		
		Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			65.200.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			205.496.000
		FS cetak sawah baru			145.000.000
		Kajian Pengembangan Kakao			530.000.000
		Program Perencanaan Sosial Budaya	Terlaksanannya koordinasi yang efektif dalam perencanaan sosial budaya		
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan			190.000.000
		Koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan SDM			62.543.000
		Koordinasi Evaluasi Perencanaan Pembangunan responsif gender			43.672.000
		Koordinasi perencanaan program pengembangan pemuda dan olahraga			52.325.000
		Penyusunan Rencana Induk Kondisi Kualitas Tenaga Pendidik Kabupaten Pidie Jaya			70.672.000
		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan keistimewaan			64.390.000
		Koordinasi monev program nasional pemberdayaan masy. Mandiri dan prog. Pembangunan daerah tertinggal			78.342.000
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya perencanaan prasarana wilayah dan SDA secara baik dan efektif		
		Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup			351.506.000
		Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang prasarana dan sumber daya air			190.647.200
		Koordinasi Penyusunan studi kelayakan infrastruktur areal perkebunan/komoditi unggulan			67.648.300
		Program kerjasama informasi dan Media massa			
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			100.000.000

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat	Badan Kesbang Linmas	234.016.700
		Penyuluhan Kepada Masyarakat			69.165.350
		Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik			87.345.850
		Penyusunan data base Partai Politik			30.565.800
		Fasilitasi Kelengkapan Pengajuan Bantuan Partai Politik			46.939.700

MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010
SUMBER DANA APBA

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
	Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal yang berkualitas	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya fasilitas pendidikan anak usia dini yang memadai		
		Pembangunan TPA 1 unit			135,30
		Pembangunan TPA 1 unit			135,30
		Pembangunan TPA 1 unit			135,30
		Pembangunan TK 1 unit			304,42
		TK Mgt Kayee Panyang 1 unit			304,42
		Pembangunan TK 1 unit			304,42
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan, tersedianya sarana dan prasarana dan terselenggaranya pendidikan wajib belajar sembilan tahun yang efektif dan berkualitas		
		Pembangunan Pagar SD 160 m			159,68
		Pembangunan MCK untuk SD (Kuta Trieng, Nyong,) 2 unit			86,98
		Rehab Rumah Guru dan Penjaga Sekolah SD Kuta Garot 2 unit			80,00
		Pembangunan agar SD Lueng Bimba 2.210 m2			2.205,58
		Ruang KKG SDN Musa 1.218 m2			309,25
		Ruang KKG SDN Beuracan 128 m 2			309,25
		Rehab Gedung SMP 1 Ulim 1 unit			50,00
		Rehab MIN Kiran 1 unit			40,00
		Rehab MIN Jangka Buya 6 Ruang			240,00
		Paving Blok MIN Ulee gle 335 m2			200,00
		Pembangunan Pagar MIN Kuta Krueng 340 m2			339,32
		Penimbunan halaman Sekolah MIN Ulee Glee 1 unit			40,00
		Pembangunan WC (MCK) SMP 4 Bandar Baru 1 unit			43,49
		Pembangunan Kantor MTsS Panteraja 2 ruang			220,00
		Pembangunan Pagar SMPN 1 Bandar Baru 300 m			299,40
		Pembangunan USB SMP Peuduek 1 unit			1.826,50
		Pembangunan Pagar SMP 2 Bandar Dua 100 m			99,80
		Pembangunan RKB SDN Blang Sukon 3 RKB			405,89
		Pembangunan Kantor SDN 1 Blang Sukon 1 unit			193,28
		Pembangunan USB SMP Ulee Gle Tunong 1 unit			1.826,50
		Rehab Berat Lokal MTsN Bandar Dua 6 Ruang			240,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pembangunan Pustaka SD 2 Lueng Putu 1 unit			96,78
		Pembangunan Pagar SD 3 Lueng Putu 180 m2			65,00
		Timbunan Sekolah SMA Bandar Baru 5000 m3			113,00
		Pembangunan Pagar SMA 2 Bandar Baru 185 m2			105,00
		Program Pendidikan Menengah			
		Pembangunan USB SMA 1 unit			1.217,64
		Pembinaan Dan Pengembangan Dayah	Terwujudnya pembinaan dayah secara optimal		
		Peyediaan Buku Agama dan Kitab Kepustakaan Pesantren (114 Pesantren x 31 Judul)			570,00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dayah	Meningkatnya sarana dan prasarana dayah secara berkualitas		
		Pembangunan Dayah Babussalam 1 Unit			240,00
		Pembangunan Dayah Muarib 1 Unit			240,00
		Bantuan Pembangunan Untuk Pesantren/Dayah			300,00
	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya parasana apartur pemerintah melalui pembangunan gedung kantor		
		Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor			
		Paket 1: Pembangunan Gedung Kantor Bupati			12.000,00
		Paket 2: Pembangunan Gedung Kantor DPRK			9.000,00
		Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor			
		Rehabilitasi Berat (Perluasan) Gedung Kantor Bappeda			1.000,00
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
		Kegiatan Pembangunan Jalan			
		Pembangunan Jalan Meureudu-Jiem-Jiem			4.500,00
		Pembangunan Jalan Gle Cut-Nangrhoe Timu-Pantang/Cot Baloi			4.500,00
		Pembukaan jalan Perkebunan Nangrhoe-Pantang Cot Baloi			1.800,00
		Pembukaan Jalan Perkebunan Kawasan Blang Rheue			1.200,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pembukaan Jalan Perkebunan Kolektif Kemukiman Nagrhoe			2.400,00
		Pembangunan (Buka Baru) Jalan Perkebunan Tgk Di Bambui Lhok Sandeng			4.800,00
		Kegiatan Pembangunan Jembatan			
		Paket 1: Pembangunan jembatan Gantung Desa Kumba 2,2 x 80 m			2.400,00
		Paket 2: Pembangunan Jembatan Gantung Lhok Puuek 2,2 x 100 m			3.000,00
		Paket 3: Pembangunan Jembatan Gantung Desa Ara 2,2 x 100 m			3.000,00
		Paket 4: Pemb. jembatan beton tipe B Ruas Jalan Drien Bungong - Jeulanga 4,5x25 m			6.875,00
		Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong			
		Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong			
		Pebuatan Box Culvert jalan negara KM 162 Dayah Baroh paya Seutuy (11x2m)			330,00
		Pebuatan Box Culvert jalan negara KM 163 samping MAN Ulim (11x2m)			330,00
		Pebuatan Box Culvert jalan negara KM 165 Gp.Nangrhoe Timu (11x2m)			330,00
		Pembangunan Box Culvert Jl Negara KM 167,5 di Blang Dalam (11 mx2m)			330,00
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan masyarakat secara berkala dan optimal		
		Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan			
		Perencanaan/DED Peningkatan (Pelebaran 2 Jalur) Jalan Trienggadeng-Jangka Buya			3.300,00
		Perencanaan/DED Peningkatan (Pelebaran 2 Jalur) Jalan Trienggadeng-Ulee Gle			3.000,00
		Perencanaan/Studi Kelayakan/DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kab. Pidie Jaya			6.000,00
		Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan			
		I. Peningkatan Jaringan Jalan (Strategis)			
		a. Paket I Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			
		- Jalan Lueng Putu - Pulo Pueb			3.000,00
		- Jalan Njong - Manyang Lancok			4.500,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		- Jalan Lueng Putu- Lancok Baroh			5.250,00
		- Jalan Sp. Poroh-Lancok Baroh			4.500,00
		b. Paket II Rehabilitasi//Pemeliharaan Jalan			
		- Jalan Trienghgadeng-Meureudu			30.000,00
		- Jalan Meureudu-Ulim			16.500,00
		- Jalan Ulim-Jangkabuya			12.000,00
		- Jalan Jangkabuya-Samalanga			12.000,00
		- Jalan Ulee Glee-Jangkabuya			4.500,00
		c. Paket III Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			
		- Jalan Lueng Putu-Blang Iboih-Jiem jiem			13.500,00
		- Jalan Lueng Putu-Blang Gapu-Musa			12.000,00
		- Jalan Paru-Cubo			7.500,00
		- Jalan Jiem Jiem-Cubo			4.500,00
		- Jalan Panteraja-Cubo			10.500,00
		- Jalan Trienggadeng-Puduek			4.350,00
		- Jalan Puduek-Panton Beurasan			6.600,00
		- Jalan Panton Beurasan-Cubo			4.500,00
		- Jalan Rawa Sari-Mns Dee			4.050,00
		d. Paket IV Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			
		- Jalan Meureudu-Geumpang			126.000,00
		- Jalan Desa Manyang-Blang Awe			9.000,00
		- Jalan Blang Awe-Beuriweh			10.500,00
		- Beuracan-Mulieng-Glumpang Tutong			21.000,00
		- Beuracan-Teupin Peuraho			3.000,00
		e. Paket V Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			
		- Jalan Sp IV-Sarah Mane			10.800,00
		- Jalan Nangrhoe-Sarah Mane			18.000,00
		- Jalan Paya Seutui-Blang Cari			10.500,00
		f. Paket VI Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			
		-Jalan Ulee Glee-Blang Kuta-Alue Sane			12.000,00
		-Jalan Abah Krueng-Jeulanga Barat-Paya Pisang Klat-Alue Sane			10.500,00
		-Jalan Jeulanga Barat-Cot Keng			3.750,00
		-Jalan Lueng Teungoh-Blang Miroe-Kumba			7.500,00
		-Jalan Drien Bungong-Meurandeh Alue-Beurasan-Kumba			7.500,00
		f. Paket VII Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		-Jalan Meuko Kuthang-Kuta Krueng-Kiran Baroh			9.000,00
		-Jalan Meugit Sagoe-Adan-Meuko Kuthang			4.500,00
		-Jalan Lueng Teungoh-Mns.Kumbang			2.250,00
		II. Peningkatan Jaringan Jalan	Meningkatnya Jaringan Jalan yang menghubungkan perkampungan Masyarakat		
		Peningkatan Jalan Lancok Baroh-Pusong			5.250,00
		Peningkatan Jalan Blang Gapu-Langgien			3.000,00
		Peningkatan Jalan Tualada - Alue - Ujong Leubat			3.750,00
		Peningkatan Jalan Kayee Raya - Sawang			4.500,00
		Peningkatan Jalan Tutong - Ara - Lancok Baroh			6.000,00
		Peningkatan Jalan Musa Baroh - Paya langet			4.500,00
		Peningkatan Jalan Lueng Putu-Blang Iboih			5.250,00
		Peningkatan Jalan Pante Raja-Blang Baro			7.800,00
		Rehabilitasi Jalan Reudeup-Mesjid Pente Raja			4.500,00
		Peningkatan Jalan Blang Usi-Blang Baro			4.500,00
		Peningkatan Jalan Sp Beurangkat-Panteraja			6.600,00
		Peningkatan Jalan Sp Beurangkat-Panteraja			6.600,00
		Pengaspalan Jalan Pante Raja Timu-Cubo			13.500,00
		Peningkatan Jalan Mulieng - Alue Deumam			10.500,00
		Peningkatan Jalan Plandok Tunong-Alue Tambo			2.550,00
		Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan			
		Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya			2.000,00
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana kebinarmagaan sebagai antisipasi peningkatan fasilitas masyarakat		
		Kegiatan Pengadaan alat-alat berat			
		Pengadaan Wheel Loader			2.000,00
		Pengadaan Flat Bad Truck			600,00
		Pengadaan Excavator (Back Hoe)			2.000,00
		Pengadaan Motor Grader			2.000,00
		Pengadaan Water Tank Truck			600,00
		Pengadaan Heavy Dump Truck			1.200,00
		Pengadaan Vibro Roller (Compactor)			1.500,00
		Pengadaan Tandem Roller			2.400,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pengadaan Tired Roller			1.000,00
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan			
		Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan			
		Paket 1 : Pembukan Jalan baru dari dusun meunasah bie-gampong			125,00
		Paket 3: Pembangunan(Buka Baru) Jalan Gp. Bidok			2.000,00
		Paket 5: Pembangunan Jalan Baru Gampong Meunasah Krueng			350,00
		Paket 6: Pembangunan Jalan SMK Ulim Desa Nangrhoe Timu			200,00
		Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan			
		Paket 2 : Peningkatan (Pengaspalan)Jalan Gp. Geunteng			2.400,00
		Paket 10: Peningkatan (Rabat Beton) Jalan Mns. Lancok-Kulam			350,00
		Paket 4: Peningkatan (Pengaspalan) Jalan Gp Nangrhoe Timu			1.760,00
		Peningkatan (Pengerasan) Jalan Gp. Blang Cut			1.200,00
		Peningkatan (Pengaspalan) Jalan Gp. Blang			1.200,00
		Peningkatan (Rabat Beton) Jl Gp. Geunteng			800,00
		Peningkatan (Pengerasan) Jalan Gp. Kuta Krueng +Talud			1.200,00
		Peningkatan (Pengerasan) Jalan Gp. Peulakan Cebrek +Talud			700,00
		Peningkatan Jalan (Rabat Beton) Gp. Reului Mangat + Talud			1.040,00
		Peningkatan Jalan Dusun Gp. Meue			2.400,00
		Peningkatan Jalan Lingkungan Gp. Balang Sukon			1.600,00
		Peningkatan (Rabat Beton) Jalan Gp. Mns. Lhok + Talud			1.440,00
		Kegiatan Normalisas Drainase/ Saluran Pembuang Perdesaan			
		Normalisasi saluran Pembuang Gp.Peulakan Tambo-Peulakan Cebrek			1.200,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Normalisasi saluran Pembuang Gp. Paya Tunong-Muko Baroh			600,00
		Normalisasi (Perluasan) Drainase Gampong Daboih s/d Curaih Panyang			880,00
		Kegiatan Pembangunan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) Perdesaan			
		Pembangunan MCK Perdesaan Kecamatan Meureudu			900,00
		Pembangunan MCK Perdesaan Kecamatan Ulim			900,00
		Pembangunan MCK Perdesaan Kecamatan Meurah Dua			570,00
		Pembangunan MCK Perdesaan Kecamatan Bandar Dua			1.350,00
		Pembangunan MCK Perdesaan Kecamatan Jangka Buya			540,00
		Pembangunan MCK Perdesaan Kecamatan Pante Raja			300,00
		Pembangunan MCK Perdesaan Kecamatan Trienggadeng			810,00
		Pembangunan MCK Perdesaan Kecamatan Bandar Baru			1.290,00
		Pembangunan WC untuk Keluarga Miskin dan Rumah Dhuafa			150.000,00
		Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Saluran Pembuang Perdesaan			
		Rehabilitasi (Lining) Drainase/ Saluran Pembuang Gampong Nangrhoe Timu (Tutue Ara-Tutue Buloh)			400,00
		Rehabilitasi Drainase/ Saluran Pembuang Gampong Bale Ulim			800,00
		Rehabilitasi Drainase/ Saluran Pembuang Gampong Bueng			520,00
		Rehabilitasi Drainase/ Saluran Pembuang Gampong Dayah Leubue			400,00
		Rehabilitasi Drainase/Saluran Pembuang Gampong Ulim Baroh			300,00
		Rehabilitasi Drainase/Saluran Pembuang Gampong Ulim Tunong			800,00
		Program Penataan dan pembangunan infrastuktur perkotaan	Tertananya pembangunan infrastuktur perkotaan		
		Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Saluran Pembuang Perkotaan			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Rehabilitasi (Lining) Drainase/ Saluran Pembuang dalam Kota Kecamatan Ulim			250,00
		Rehabilitasi (Lining) Drainase/ Saluran Pembuang dalam Kota Kecamatan Bandar Dua			450,00
		Rehabilitasi (Lining) Drainase/ Saluran Pembuang dalam Kota Kecamatan Jangka Buya			225,00
		Rehabilitasi (Lining) Drainase/ Saluran Pembuang dalam Kota Kecamatan Meureudu			1.000,00
		Rehabilitasi (Lining) Drainase/ Saluran Pembuang dalam Kota Kecamatan Meurah Dua			300,00
		Rehabilitasi (Lining) Drainase/ Saluran Pembuang dalam Kota Kecamatan Trienggadeng			400,00
		Rehabilitasi (Lining) Drainase/ Saluran Pembuang dalam Kota Kecamatan Pante Raja			350,00
		Rehabilitasi (Lining) Drainase/ Saluran Pembuang dalam Kota Kecamatan Bandar Baru			500,00
		Program Pengembangan Kawasan dan Perumahan Perdesaan			
		Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Kurang Mampu	Terbangunnya rumah masyarakat miskin		
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Meurah Dua			17.100,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Ulim			27.000,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Bandar Dua			40.500,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Jangka Buya			16.200,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Meureudu			27.000,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Trienggadeng			24.300,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Pante Raja			9.000,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Bandar Baru			38.700,00
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Ibadah			
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rumah Ibadah			
		Rehabilitasi/ Perbaikan Mesjid dalam Kecamatan Bandar Baru			3.200,00
		Rehabilitasi/ Perbaikan Mesjid dalam Kecamatan Pante Raja			800,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Rehabilitasi/ Perbaikan Mesjid dalam Kecamatan Trienggadeng			1.600,00
		Rehabilitasi/ Perbaikan Mesjid dalam Kecamatan Meureudu			2.000,00
		Rehabilitasi/ Perbaikan Mesjid dalam Kecamatan Meurah Dua			1.200,00
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
		Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran			
		Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 10 Roda			1.500,00
		Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 6 Roda			1.000,00
		Pengadaan Mobil Tangki Penunjang/Suplai Air 36.000 liter			1.000,00
		Program Perencanaan Tata Ruang			
		Kegiatan Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan			
		Penyusunan RDTR Kawasan Ibukota Kecamatan Bandar Baru			800,00
		Penyusunan RDTR Kawasan Ibukota Kecamatan Pante Raja			800,00
		Penyusunan RDTR Kawasan Ibukota Kecamatan Trienggadeng			800,00
		Kegiatan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan			
		Penyusunan RTBL Koridor Manyang-Blang Awe			800,00
		Penyusunan RTBL Koridor Blang Awe-Rungkom			800,00
		Penyusunan RTBL Koridor Rungkom-Beuriweueh			800,00
		Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Gampong			
		Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman/ DED Perdesaan 50 Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya			25.000,00
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			
		Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			
		Pembangunan Bronjong dan Talud Penahan Banjir Krueng Putu			12.000,00
		Pemasangan Bronjong Pada Tebing Sungai Pante Raja Barat			4.500,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pemasangan Bronjong Tebing Sungai Desa Dayah Husen-Desa Mancang			2.400,00
		Perkuatan Tebing Sungai Panteraja Timur			2.200,00
		Pemasangan Talud Jalan Bl.Awe-Beurawang			1.200,00
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terbangunnya sistem pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan lainnya bagi peningkatan pertanian dan perkebunan rakyat		
		Kegiatan Pembangunan Pintu Air			
		Box Pembagi Air Irigasi dalam kabupaten Pidie Jaya			4.000,00
		Kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai			
		Sudetan/Pelurusan dan Revetment Tebing Krueng Meureudu			90.000,00
		Normalisasi dan Revetmen Krueng Beuracan			60.000,00
		Normalisasi dan Revetment Tebing Krueng Trienggadeng			60.000,00
		Normalisasi dan Revetment Tebing Krueng Pante Raja			16.000,00
		Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi			
		Rehabilitasi (Lining) Saluran Irigasi Lueng Keurabeuk			1.625,00
		Rehabilitasi (Lining) Saluran Irigasi lueng induk Gp. Paya Seutui (Cot Capa)			2.600,00
		Rehabilitasi (Lining) Saluran Irigasi Lampoh U			1.170,00
		Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai			
		Normalisasi (Perluasan dan pengerukan) Krueng Kiran			17.500,00
		Normalisasi (Perluasan dan pengerukan,pasangan batu) Drainase/ Saluran Induk Krueng Pangwa (Paya Trieng-Pangwa)			40.000,00
		Normalisasi (Perluasan dan pengerukan,pasangan batu) Krueng Trienggadeng (Tampui--Trienggadeng)			40.000,00
		Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi			
		Pembangunan Bendung Irigasi Krueng Kiran (Lueng Limeng) 460 ha			18.000,00
		Kegiatan Normalisasi Jaringan Irigasi			
		Normalisasi (Pengerukan dan Pasangan Batu) Saluran Irigasi Krueng Gahru			4.000,00
		Normalisasi (Pengerukan dan Pasangan Batu) Saluran Irigasi Lueng Kale			2.400,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Normalisasi Saluran Irigasi (Pengerukan dan Pasangan Batu) Jeulanga Barat-Babah Krueng			7.000,00
		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			
		Kegiatan Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya			
		FS/DED Pembangunan Waduk Lhok Sandeng Multi Purpose:Energi Listrik (Power Plant),Pengendalian Banjir (Flood Control), Air Minum (Water Suply System) dan Irigasi (Irrigation System)			5.000,00
		Kegiatan Perencanaan pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			
		FS/DED Krueng Meureudu 6000 m			3.000,00
		FS/DED Krueng Trienggadeng 5000 m			2.500,00
		Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Embung/Waduk dan bangunan penampung air lainnya			
		Normalisasi Waduk Paya Trieng Ueh Gp. Ujong Leubat			5.000,00
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			
		Kegiatan Pengembangan distribusi air minum			
		Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Tirta Krueng Meureudu 100 l/dt			21.000,00
		Program pengendalian banjir			
		Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai			
		Rehabilitasi Tanggul Pengendali Banjir Krueng Meureudu Gp.Pante Beureune-Gp.Seunong			600,00
		Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai			
		Revetment dan Normalisasi Muara (Estuary) Krueng Kiran			30.000,00
		Revetment dan Normalisasi Muara (Estuary) Krueng Ulim			30.000,00
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Kegiatan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan			
		Studi Kelayakan Lalu Lintas Pidie Jaya			100,00
		Kegiatan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan			
		Pembangunan Dermaga Pasi Aron			2.000,00
		Pembangunan Pelabuhan Rakyat Trienggadeng & DED			15.000,00
		Kegiatan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat			
		Pengaspalan Pangkalan Labi-Labi Ibukota Kecamatan Bandar Dua			60.000,00
		Pengaspalan Pangkalan Labi-Labi Ibukota Kecamatan Trienggadeng			96.000,00
		Pengaspalan Pangkalan Labi-Labi Ibukota Kecamatan Bandar Baru			140.000,00
		Program peningkatan pelayanan angkutan			
		Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya			
		Pengadaan Mobil Pick Up Double Cabin pengamanan Lalu Lintas (Pam Lalin) Angkutan Jalan			550,00
		Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan			
		Pengadaan Bus Sekolah dan Bus Angkutan			800,00
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
		Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal			
		- Pengadaan Tanah Terminal Transit Bandar Dua			1.500,00
		- Pengadaan Tanah Terminal Transit Bandar Baru			1.500,00
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas			
		Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas			
		Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kabupaten Pidie Jaya			200,00
		Kegiatan Pengadaan marka jalan			
		Pengadaan Marka Jalan dan Zebra Cross			250,00
		Pengadaan Zona keselamatan Lalu Lintas 8 Kecamatan			1.000,00
		Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Kec.Pante Raja			190,00
		Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Kec.Trienggadeng			95,00
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
		Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi			
		Instalasi dan Konfigurasi Jaringan LAN/WAN pada Seluruh SKPD dalam kabupaten Pidie Jaya			300,00
		Instalasi Jaringan Telepon IP PBX pada Perkantoran Kabupaten Pidie Jaya			150,00
		Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi			
		Evaluasi SDM di lingkungan Pemerintah			200,00
		Bimbingan Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi			200,00
		Workshop dan teknologi Informasi			50,00
		Rehab / pembentukan Pos			500,00
		Fasilitas Pos dan Kendaraan			250,00
		Fasilitas Ranmor Perhubungan (HT, Rig, Repeater)			250,00
		Kegiatan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi			
		Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi			100,00
		Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi			
		Pengadaan Alat Studio (Sound System 20.000 watt)			250,00
		Pengadaan Repeater Radio Komunikasi VHF Pemkab.Pidie Jaya			75,00
		Pengadaan Radio Komunikasi VHF Pendukung Operasional SKPD pemkab.Pidie Jaya			125,00
		Pengadaan 5 Unit Telepon Satelit			50,00
		Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi			
		Pengembangan Internet Pemkab. Pidie Jaya			200,00
		Kegiatan Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi			
		Perencanaan Pengembangan Manajemen Keamanan Informasi			150,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Komunikasi Masyarakat			
		Pengadaan Mobil siaran keliling			1.000,00
		Kegiatan Pengadaan Sarana Komunikasi Multi Media dan Internet			
		Pengadaan dan Pemasangan Provider Internet Bandar Dua			200,00
		Pemasangan Provider Internet Bandar Baru			200,00
		Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			
		Monitoring Komunikasi dan Informasi			250,00
		Program kerjasama informasi dan media massa			
		Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi			
		Pelatihan Aplikasi Surat Dinas Online			100,00
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
		Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			
		Pengadaan Gerobak Mesin Roda 3 Pengangkut Sampah (8 Kec.)			300,00
		Kegiatan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan			
		Pengadaan Tanah TPA Bandar Dua			500,00
		Pengadaan Tanah TPA Langgien			500,00
		Pengadaan Alat-alat Pembuatan Pupuk Kompos			70,00
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
		Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan			
		Pembuatan Sumur Resapan			80,00
		Program Perlindungan Konservasi dan Sumber Daya Alam			
		Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air & Pengendalian Kerusakan Sumber Air			
		Kajian Dampak Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS)			100,00
		Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Tambak Rakyat			209,00
		Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Tambak Rakyat			45,00
		Kegiatan Pantai dan Laut Lestari			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Penanaman pohon tepi pantai (lengkap dengan pagar) Jangka Buya			875,00
		Penanaman pohon tepi pantai (lengkap dengan pagar) Ulim			700,00
		Penanaman pohon tepi pantai (lengkap dengan pagar) Panteraja			700,00
		Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Sungai dan Rawa			
		Penanaman Pohon Penguat Tebing Sungai (lengkap dengan pagar) Ulim			175,00
		Penanaman Pohon Penguat Tebing Sungai (lengkap dengan pagar) Meureudu			175,00
		Penanaman Pohon Penguat Tebing Sungai (lengkap dengan pagar) Tringgadeng			175,00
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam			
		Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
		Perbaikan dan Rehabilitasi Lahan Rakyat			170,00
		Program Pengendalian kebakaran hutan			
		Kegiatan Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan			
		Pengadaan Mobil Tangki Penyiraman Tanaman			600,00
		Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perdesaan			
		Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang Lingkungan Perumahan Perdesaan			
		Pembangunan Saluran limbah rumah tangga			1.300,00
		Pembangunan Saluran limbah rumah tangga 8 desa			1.600,00
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan			
		Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan			
		Pemasangan Tiang dan Pemasukan Arus Listrik Gp.Lhok Sandeng dan Sarah Mane			4.000,00
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan			
		Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pengadaan Sumur Bor untuk Air Bersih/ Minum Gampong Nangrhoe Timu			200,00
		Sumur Bor untuk Air Bersih/ Minum Gp. Alue Keumiki			200,00
		Pengadaan Sumur Bor untuk Air Bersih/ Minum Kemukiman Ulim Tunong			1.400,00
		Pengadaan Sumur Bor untuk Air Bersih/ Minum kemukiman Kuta Simpang			1.400,00
		Pengadaan Sumur Bor untuk Air Bersih/ Minum Kemukiman Ulee Gle Dalam			600,00
		Pengadaan sumur bor untuk Air Bersih/ Minum			200,00
		Pengadaan Sumur Artesis 8 Kecamatan			2.000,00
	Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komoditi unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja			
		SID/DED Gedung BLK			195,00
		Pembangunan Gedung BLK			6.500,00
		Peningkatan Kesempatan Kerja	Terciptanya lapangan kerja masyarakat		
		Padat Karya Produktifitas			
		Rehabilitasi Jalan 20.000 Meter			4.000,00
		Rehabilitas saluran Cacing 16.000 Meter			4.000,00
		Perlindungan Pembangunan Ketenagakerjaan	Terwujudnya perlindungan jaminan sosial masyarakat dalam pelaksanaan ketenaga kerjaan		
		Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan (JAMSOSTEK)			256,00
		Sosialisasi Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Ketenaga Kerjaan			220,00
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro/UKM			
		Bantuan Modal Kerja bagi Koperasi/UKM dan Kelompok			1.628,00
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		- Pembangunan Toko Bertingkat Milik PEMDA Pidie Jaya 20 unit (20 M x 2.600.00x 2 lantai)			2.080,00
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
		Kegiatan SLPHT Kakao			342,00
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
		Kegiatan Rehabilitasi Hutan Pantai			1.200,00
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan			
		Kegiatan Pengadaan Mobil Patroli Polhut			900,00
		Kegiatan Pembangunan Gedung Polhut / Pamhut			1.000,00
		Peningkatan Ketahanan Pangan			
		- Pemanfaatan Pekarangan			1.005,00
		- Pembinaan Kelompok Usaha Makanan Khas Aceh			100,00
		Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			
		- Pendidikan dan Pelatihan bagi PPL			60,00
		Pengembangan Peningkatan Penyuluh			
		- Pembinaan Wilyah Kerja Penyuluh			80,00
		- Magang KTNA dan Petani			120,00
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
		- Pembangunan Kantor Dekranas 1 unit (4 x 12 m x Rp. 2.600.000 x 2 lantai)			249,60
		Peningkatan Ketahanan Pangan			
		Pengembangan Desa Mandiri Pangan			
		- Pemberdayaan Penangkar Benih			50,00
		Pengembangan dan Peningkatan Sumber daya Lahan dan Air			
		Rehabilitasi Jaringan Air Tingkat Usaha tani			
		- Meureudu			780,00
		- Meurah Dua			1.300,00
		- Kuta Pangwa dan Dayah pangwa (Tringgadeng)			1.300,00
	Pembinaan wawasan keislaman dan pelaksanaan syariat islam secara berkelanjutan dan berkeadilan serta pembangunan sosial budaya.	Pembinaan Anak Terlantar	Terbantunya dan pembinaan terhadap anak terlantar		
		Bantuan dan Pembinaan Anak Terlantar			50,00
		Pelatihan Praktek Belajar Kerja			350,00
		Bantuan Tempat Pendidikan Anak			50,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Bantuan Bakat dan Minat anak			150,00
		Pembinaan Panti Asuhan/Jompo			
		Pemberdayaan Lansia Produktif			500,00
		Bantuan Sandang Panti Asuhan			60,00
		Permakanaan/pemenuhan Gizi Anak Panti Asuhan			850,00
		Pelatihan PSM			50,00
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
		Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial			125,00
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
		Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan			575,00
		Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa			1.000,00
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
		Pelaksanaan KIE Konsling dan Kompanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).			75,00
		Pengadaan Becak Motor Modifikasi			175,00
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Nara Pidana PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Terciptanya pembinaan para penyandang masalah sosial		
		Pembangunan Pusat Bimbingan / Konsling Bagi Eks Penyandang penyakit sosial			1.800,00
		Pemberdayaan Para Penyandang Pemyakit Sosial			160,00
		Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam			
		Pembinaan Dalail Khairat dan Meurekon			1.110,00
		Pengembangan Sistem Informasi Syariat Islam			
		Pembuatan Uraian Qanun (Pamplet)			44,00
		Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pelaksana Syariat Islam			
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tuha Peut Gampong Tentang Pelaksanaan Syariat Islam			150,96
		Bantuan Guru Pengajian			350,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
	Penguatan kelembagaan Pemerintah yang berbasis teknologi, Politik dan hukum	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana			
		Pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan Kab. Pidie Jaya			750,00
		Pembangunan Gedung Syariat Islam 1 Unit			1.500,00
		Pengadaan Balai Pengajian 18 Unit			900,00
		Pembangunan Meunasah 6 Unit			1.350,00
		Pengadaan Tanah Balai Pengajian			50,00
		Pembangunan Mesjid Kecamatan			300,00
		Pembangunan Pagar KUA			100,00
		Rehab Mesjid 2 Unit			1.000,00
		Kelanjutan Pembangunan Mesjid Ulee Gle			200,00
		Kelanjutan Pembangunan Mesjid Uteun Bayu			150,00
		Pembangunan TPA			50,00
		Pengadaan tanah Gedung BLK			3.000,00
		Pengadaan tanah untuk TPA Bandar Dua			500,00
		Pengadaan tanah untuk TPA Langgien			500,00
		Pengadaan Tanah Pertapakan Gedung Arsip dan Perpustakaan Kab.Pidie Jaya			150,00
		Pengadaan Tanah Untuk Makodim Pidie Jaya 8 Ha			12.000,00
		Pengadaan Tanah Kantor Perwira Penghubung 1 Ha			1.500,00
		Pengadaan Tanah Koramil Pante Raja 1 Ha			1.500,00
		Pengadaan Tanah untuk kantor Mahkamah Syar iyah			750,00
		Pengadaan Tanah utk Gedung Kejaksaan Tinggi meureudu dan rumah dinas			600,00

MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010
SUMBER DANA APBN

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
	Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal yang berkualitas	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		DepdiknaS	
		Pembangunan Gedung Kantor P Dan K			3.270,00
		Pembangunan Gedung SKB			545,00
		Pembangunan Gedung Pembinaan Peningkatan Mutu Guru (PPMG)			2.670,00
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
		Pembangunan Pustaka SMP			1.660,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB			8.050,00
		Rehabilitasi Ruang Kelas SMP			500,00
		Pembangunan WC Sekolah			760,00
		Program Pendidikan Menengah			
		Pembangunan Laboratorium IPA SMA 2 Unit			290,00
		Pembangunan Pustaka SMA 2 unit			330,00
		Rehabilitasi Ruang Kelas SMA 10 Unit			500,00
	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Dep, Pekerjaan Umum	
		Kegiatan Pembangunan Jalan			
		Pembukaan Jalan Perkebunan Kolektif Kemukiman Nagrhoe			2.400,00
		Pembangunan (Buka Baru) Jalan Perkebunan Tgk Di Bambui Lhok Sandeng			4.800,00
		Pembangunan (Buka Baru) Jalan Perkebunan Cot Saka Lhok Sandeng			4.200,00
		Pembangunan Jalan Perkebunan Panton Raya-Ulee Gunong			2.400,00
		Peningkatan (Pengerasan) Jalan Perkebunan Alue Dama-Lhok Drien			4.200,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Kegiatan Pembangunan Jembatan			
		Paket 4: Pemb. jembatan beton tipe B Ruas Jalan Drien Bungong - Jeulanga 4,5x25 m			6.875,00
		Paket 5: Pemb. Jbt. Beton Kafe (Jl. Sp Beurangkat-Panteraja (Penggantian) 4,5x22 m			6.050,00
		Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong			
		Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong			
		Pebuatan Box Culvert jalan negara KM 162 Dayah Baroh paya Seutuy (11x2m)			330,00
		Pebuatan Box Culvert jalan negara KM 163 samping MAN Ulim (11x2m)			330,00
		Pebuatan Box Culvert jalan negara KM 165 Gp.Nangrhoe Timu (11x2m)			330,00
		Pembangunan Box Culvert Jl Negara KM 167,5 di Blang Dalam (11 mx2m)			330,00
		Pebuatan Box Culvert jalan negara KM 168 Ulee Gle (8x2m)			240,00
		Rehabilitasi Gorong-Grong Jalan Kemukiman Pante Raja Barat (Rebuild Box Culvert)			1.800,00
		Pembangunan Saluran Pembuang Waduk Paya Cirieh			1.500,00
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			
		Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			
		Pembangunan Bronjong dan Talud Penahan Banjir Krueng Putu			12.000,00
		Pemasangan Bronjong Pada Tebing Sungai Pante Raja Barat			4.500,00
		Pemasangan Bronjong Tebing Sungai Desa Dayah Husen-Desa Mancang			2.400,00
		Perkuatan Tebing Sungai Panteraja Timur			2.200,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pemasangan Bronjong Kr Meureudu Gp Dayah Usen-Mns Mancang			2.400,00
		Pemasangan Bronjong Tebing Krueng Ulim Gp. Alue Sane			9.000,00
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
		Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan			
		Perencanaan/DED Peningkatan (Pelebaran 2 Jalur) Jalan Trienggadeng-Jangka Buya			3.300,00
		Perencanaan/DED Peningkatan (Pelebaran 2 Jalur) Jalan Trienggadeng-Ulee Gle			3.000,00
		Perencanaan/Studi Kelayakan/DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kab. Pidie Jaya			27.000,00
		Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan			
		I. Peningkatan Jaringan Jalan (Strategis)			
		b. Paket II Rehabilitasi//Pemeliharaan Jalan			
		- Jalan Trienghgadeng-Meureudu			30.000,00
		- Jalan Meureudu-Ulim			16.500,00
		- Jalan Ulim-Jangkabuya			12.000,00
		- Jalan Jangkabuya-Samalanga			12.000,00
		- Jalan Ulee Glee-Jangkabuya			4.500,00
		c. Paket III Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			
		- Jalan Lueng Putu-Blang Iboih-Jiem jiem			13.500,00
		- Jalan Lueng Putu-Blang Gapu-Musa			12.000,00
		- Jalan Panteraja-Cubo			10.500,00
		d. Paket IV Rehabilisati/Pemeliharaan Jalan			
		- Jalan Meureudu-Geumpang			126.000,00
		- Jalan Desa Manyang-Blang Awe			9.000,00
		- Jalan Blang Awe-Beuriweh			10.500,00
		- Beuracan-Mulieng-Glumpang Tutong			21.000,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		- Beuracan-Teupin Peuraho			3.000,00
		e. Paket V Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			
		- Jalan Sp IV-Sarah Mane			10.800,00
		- Jalan Nangrhoe-Sarah Mane			18.000,00
		- Jalan Paya Seutui-Blang Cari			10.500,00
		f. Paket VI Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			-
		Jalan Ulee Glee-Blang Kuta-Alue Sane			12.000,00
		Jalan Abah Krueng-Jeulanga Barat-Paya Pisang Klat-Alue Sane			10.500,00
		II. Peningkatan Jaringan Jalan			
		Peningkatan Jalan Jalan Nyong-Kuala			2.519,00
		Peningkatan Jalan Lancok Baroh			5.294,00
		Peningkatan Jalan Lueng Putu-Pulo Pueb			2.712,00
		Peningkatan Jalan Paru-Kuala			1.811,00
		Peningkatan Pulo Puep-Sawang			2.029,00
		peningkatan Jalan Paru Cot-Lancang			4.359,00
		Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan			
		Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya			2.000,00
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
		Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			
		Pengadaan Mobil Amrol Truck Pengangkut Sampah ke TPA			800,00
		Pengadaan Mobil Penguras/Penyedot Tinja			700,00
		Pengadaan Mobil Penguras/Penyedot Tinja			2.100,00
		Pengadaan Mobil Operasional/Patroli			175,00
		Pengadaan Kontainer/Bak Sampah			250,00
		Pengadaan Tong Sampah Fibre Glass Ibukota Kecamatan (8 Kecamatan)			503,25

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pengadaan Gerobak Sampah Ibukota Kecamatan (8 Kecamatan)			360,00
		Pengadaan Gerobak Mesin Roda 3 Pengangkut Sampah (8 Kec.)			1.200,00
		Kegiatan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan			
		Pengadaan Unit Pengolahan Sampah (3R) / TPA Sanitary Land Fill			1.520,00
		Kegiatan Paket Bantuan Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan		Kementrian Daerah Tertinggal	
		Paket Bantuan P2KP Kec. Bandar Baru			3.000,00
		Paket Bantuan P2KP Kec. Pante Raja			3.000,00
		Paket Bantuan P2KP Kec. Trienggadeng			3.000,00
		Paket Bantuan P2KP Kec. Meureudu			3.000,00
		Paket Bantuan P2KP Kec. Meurah Dua			3.000,00
		Paket Bantuan P2KP Kec. Ulim			3.000,00
		Paket Bantuan P2KP Kec. Jangka Buya			3.000,00
		Paket Bantuan P2KP Kec. Bandar Dua			3.000,00
		Program pengembangan wilayah Tertinggal dan Terisolir			
		Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana wilayah Tertinggal dan terisolir			
		Paket Bantuan PPIP Kec. Bandar Baru			10.500,00
		Paket Bantuan PPIP Kec. Pante Raja			2.500,00
		Paket Bantuan PPIP Kec. Trienggadeng			6.500,00
		Paket Bantuan PPIP Kec. Meureudu			7.500,00
		Paket Bantuan PPIP Kec. Meurah Dua			4.500,00
		Paket Bantuan PPIP Kec. Ulim			7.500,00
		Paket Bantuan PPIP Kec. Jangka Buya			4.500,00
		Paket Bantuan PPIP Kec. Bandar Dua			11.000,00
		Program Pengembangan Perumahan			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat			
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Meurah Dua			17.100,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Ulim			27.000,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Bandar Dua			40.500,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Jangka Buya			16.200,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Meureudu			27.000,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Trienggadeng			24.300,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Pante Raja			9.000,00
		Pembangunan Rumah Dhuafa Kecamatan Bandar Baru			38.700,00
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
		Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran			
		Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 10 Roda			1.500,00
		Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 6 Roda			1.000,00
		Pengadaan Mobil Tangki Penunjang/Suplai Air 36.000 liter			1.000,00
		Program Perencanaan Tata Ruang			
		Kegiatan Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan			
		Penyusunan RDTR Kawasan Ibukota Kecamatan Bandar Baru			800,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Penyusunan RDTR Kawasan Ibukota Kecamatan Pante Raja			800,00
		Penyusunan RDTR Kawasan Ibukota Kecamatan Trienggadeng			800,00
		Penyusunan RDTR Kawasan Ibukota Kecamatan Ulim			800,00
		Penyusunan RDTR Kawasan Ibukota Kecamatan Bandar Dua			800,00
		Penyusunan RDTR Kawasan Ibukota Kecamatan Jangka Buya			800,00
		Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan			55.500,00
		Kegiatan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan			
		Penyusunan RTBL Koridor Manyang-Blang Awe			800,00
		Penyusunan RTBL Koridor Blang Awe-Rungkom			800,00
		Penyusunan RTBL Koridor Rungkom-Beuriweueh			800,00
		Penyusunan RTBL Koridor Beuriweuwh-Manyang (Jalan Nasional)			800,00
		Penyusunan RTBL dan DED Kawasan Perkantoran Cot Trieng			800,00
		Penyusunan RTBL dan DED Kawasan Perumahan Pegawai Rungkom			800,00
		Penyusunan RTBL Kawasan Kota Meureudu			800,00
		Penyusunan RTBL Kawasan Kota Meurah Dua (Babah Jurong)			800,00
		Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Gampong			
		Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman/ DED Perdesaan 50 Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya			25.000,00
		Program pengembangan wilayah Tertinggal dan Terisolir		Kementrerian Daerah Tertinggal	

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana wilayah Tertinggal dan terisolir			
		Paket Bantuan P2DTK Kec. Bandar Baru			11.000,00
		Paket Bantuan P2DTK Kec. Pante Raja			2.500,00
		Paket Bantuan P2DTK Kec. Trienggadeng			7.000,00
		Paket Bantuan P2DTK Kec. Meureudu			7.500,00
		Paket Bantuan P2DTK Kec. Meurah Dua			5.000,00
		Paket Bantuan P2DTK Kec. Ulim			7.500,00
		Paket Bantuan P2DTK Kec. Jangka Buya			4.500,00
		Paket Bantuan P2DTK Kec. Bandar Dua			11.500,00
		Program Pengadaan Sarana Perhubungan dan Transportasi Daerah		Dep. Perhubungan	
		Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Darat Perdesaan			
		Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan Pick Up (Bak Terbuka)			3.850,00
		Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan Mobil Truck			800,00
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
		Kegiatan Pembangunan gedung kantor			
		Pembangunan Kantor Pos dan Giro Kabupaten Pidie Jaya (100m2)			250,00
		Pembangunan Kantor Pos dan Giro Kecamatan Pante Raja (100m2)			1.250,00
		Pembangunan Kantor Pos dan Giro Kecamatan Ulim (500m2)			1.250,00
		Pembangunan Kantor Pos dan Giro Kecamatan Jangka Buya (500m2)			
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
		Kegiatan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan			2.000,00
		Pembangunan Dermaga Pasi Aron			15.000,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pembangunan Pelabuhan Rakyat Trienggadeng & DED			
		Program peningkatan pelayanan angkutan			
		Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya			550,00
		Pengadaan Mobil Pick Up Double Cabin pengamanan Lalu Lintas (Pam Lalin) Angkutan Jalan			
		Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan			800,00
		Pengadaan Bus Sekolah dan Bus Angkutan			
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
		Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal			15.000,00
		- Pembangunan Terminal Type B Pidie Jaya			
		Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya			275,00
		Pengadaan Pick Up Double Cabin pengamanan Lalu Lintas (Pam Lalin) Angkutan Jalan			
		Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan			1.600,00
		Pengadaan Bus Sekolah 2 (dua) Unit dan 2 Unit Bus Angkutan			
		Kegiatan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal			640,00
		Pembangunan Halte			
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas			
		Kegiatan Pengadaan marka jalan			1.000,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pengadaan Zona keselamatan Lalu Lintas 8 Kecamatan			
		Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan			760,00
		Pemasangan Warning Light			
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			
		Kegiatan Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor			7.000,00
		Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Pidie Jaya			
		Kegiatan Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor			1.500,00
		Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Pidie Jaya			
		Program Pengadaan Sarana Perhubungan dan Transportasi Daerah			
		Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Darat Perdesaan			200,00
		Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan Pick Up Bak Terbuka			200,00
		Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan Pick Up Bak Terbuka			400,00
		Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan Pick Up Bak Terbuka			
		Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi dan Patroli Perairan			500,00
		Pengadaan Sarana Transportasi Laut Speed Boat Fibre Glass			500,00
		Pengadaan Sarana Transportasi Laut Speed Boat Fibre Glass			500,00
		Pengadaan Sarana Transportasi Laut Speed Boat Fibre Glass			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif	
	Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU DAN RUMAH SAKIT MATA				
		Pembangunan Rumah Sakit				
		- Pembangunan Sal Bedah Pria			904,33	
		- Pembangunan Sal Bedah Wanita			904,33	
		Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit				
		- Pengadaan Alat-alat Kesehatan			1.000,00	
		- Pengadaan Mobiler RSU Meureudu dan RS Ibu Anak			2.000,00	
			PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARAN DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA (DAK)			
			1. Pembangunan Puskesmas			
		- Puskesmas Leung Putu Bertingkat			1.960,00	
		- Puskesmas Kuta Krueng Bertingkat			1.680,00	
		2. Pembangunan Posyandu				
		, - Pembangunan Poskesdes 30 Unit Type 72			6.480,00	
		3. Pembangunan Gudang Farmasi				
		- Gudang Farmasi			600,00	
		4. Pembangunan Rumah Dokter				
		- Rumah Dokter Umum 4 Unit Type 70			840,00	
		- Rumah Dokter Gigi 4 Unit Type 70			840,00	
		- Rumah Paramedis 8 Unit Type 56			1.344,00	
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		1. Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial			
		, - Pengadaan Alat Medis			
		1. Puskesmas			120,00
		2. Poskesdes			1.200,00
		, - Pengadaan Peralatan Posyandu			
		1. Posyandu			283,50
		PROGRAM SARANA DAN PRASARANA			
		1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			
		- Pengadaan Kendaraan Roda 4			600,00
		- Pengadaan Kendaraan Roda 2			320,00
		PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
		1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat			
		-Presentation Kit (Laptop, Projekte, LCD, Proyektor dan Layar			264,00
		-UHF Meeting Amplifire			4,80
		-Public Addres System / Megaphon			25,00
		-Hendiken			9,60
		-Foto Digital			3,30
		-Dener PHBS			21,00
		-Lembar Balik			20,00
		-Baliho / Panflet			90,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT			
		Penyuluham Menciptakan Lingkungan Sehat			
		- Pembangunan Tempat Wudhuk dan MCK			640,00
		- Baleho/BilBoard			108,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		- Rehabilitasi Sumur Penduduk Miskin 100 Unit			600,00
		- Pembangunan WC Penduduk Miskin 100 Unit			1.200,00
		- Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)			120,00
		- Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Institusi Sekolah			144,00
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULAGAN PENYAKIT MENULAR			
		Pengadaan Alat-alat Fagging dan bahan-bahan Fogging			
		- Pengadaan Swingfox			55,00
		- Pengadaan Bahan Pestisida/ Racun			50,00
		- Pengadaan Microskop			24,00
		-Pengadaan Alat Suntik Kegiatan Imunisasi (0,05), (0.5) dan (5,0)			15,00
		- Pelatihan Tenaga Tehnis Pengelola Cold Chain/Rantai Vaksin			25,00
		- Pelatihan Suvailans Puskesmas			15,00
		- Pelatihan Petugas Filariasis Kabupaten dan Puskesmas			15,00
		- Pengadaan Refrigerator (Kulkas Vaksin)			68,00
		PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN			
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesdehatan			700,00
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN			
		Alat-alat Kesehatan			2.000,00
		Pelatihan Peningkatan SDM Petugas Jiwa			30,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK			
		Pelatihan Peningkatan SDM Kader Poskesdes Desa Siaga.			82,00
		Pelatihan Peningkatan SDM Bidan APN			75,00
		Pelatihan APHIKSIA bagi Bidan			30,00
		Pembentukan Desa Siaga Baru			140,00
	Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komoditi unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan	PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA		Dep, Ketenagakerjaan	
		Padat Karya Produktif :			
		a. Rehabilitasi Jalan			3.500,00
		b. Rehabilitasi Saluran Cacing			3.200,00
		Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai (3 akt x 8 kec.)			660,00
		Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan (3 akt 8 kec)			520,00
		PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGA KERJAAN			
		Fasilitas Penyelesaian, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)			256,00
		Sosialisasi Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Tentang Ketenaga Kerjaan			220,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI			
		Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah			
		-Peningkatan Kerja Sama Antar Wilayah dan Antar sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi			2.125,00
		- Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi dikawasan Transmigrasi			725,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		- Pengarahan dan Vasilitas Pemindahan Serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM			485,60
		Pemberdayaan Ekonomi Rehabilitasi & Rekonstruksi Koperasi UKM		Dep. Koperasi dan UKM	
		Bantuan Dana Bergulir bagi usaha simpan pinjam Koperasi			2.300,00
		Pengembangan Sarana Usaha Produksi			1.800,00
		Bantuan Dana Bergulir utk Koperasi penampungan hsl bumi (kakao)			14.500,00
		Diklat KSP/USP Pola Syariah bagi Koperasi dan Pembina			200,00
		Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi bagi anggota Kop.			3.000,00
		TPUK bagi Kopontren			800,00
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Dep, Perindustrian	
		1. Bantuan Mesin/Peralatan Pendingin (Coldry Room) bagi Industri Kecil dan Menengah			1.000,00
		2. Pembinaan Industri Kecil			250,00
		Pembangunan Pasar Ikan/Sayur/Daging			2.750,00
		Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
		1. Kegiatan :			
		Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya			
		- Industri Kecil Mie Basah			85,40
		- Industri Kecil Tahu Tempe			112,00
		- Industri Kecil beronjong (bantuan bahan)			180,00
		- Industri Kecil Perabot Rumah Tangga			255,15
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian		Dep. Pertanian	
		Pembuatan Embung/Dam Parit			400,00
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pengembangan Desa Mandiri Pangan - Pengembangan Padi 5000 Ha (BLM)			6.750,00
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Pengadaan Sarana dan Prasarana			
		Pencetakan Sawah Baru			351,00
		Konservasi Lahan (Pemanfaatan lahan Tidur)			108,00
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan			
		Peningkatan kesejahteraan Penyuluh Pertanian			
		- Biaya Operasional kegiatan dan administrasi Penyuluh Pertanian			151,20
		- Penyuluh dan Pendamping Gapoktan PUAP			64,80
		- Penyuluh dan Pendamping Desa Mandiri Pangan (Demapan)			32,40
		Pembibitan dan Perawatan Ternak			
		- Pengembangan bibit sapi lokal			700,00
		Pendistribusian Bibit ternak Kepada Masyarakat			
		- Pengembangan ternak kerbau			500,00
		- Penggemukan ternak sapi potong			800,00
		- Integrasi tanaman ternak unggas			450,00
		- Integrasi tanaman ternak			400,00
		- Pengembangan UPJA unggas (penetasan/pengolah			100,00
		- Unit layanan inseminasi buatan (ULIB)			100,00
		Pembangunan Pusar-pusat Penampungan Produksi Hasil Peternakan Masyarakat			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		- Pembangunan Rumah Potong Hewan			400,00
		- Pembangunan Rumah Potong Unggas			250,00
		- Pembangunan Tempat Penjualan Daging			250,00
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
		Pembibitan dan Perawatan Ternak			
		- Pengembangan bibit sapi lokal			630,00
		- Pengembangan Bibit kambing Lokal			157,50
		Pengembangan Agribisnis Peternakan			
		- Penggemukan ternak sapi potong			720,00
		- Pengadaan Pejantan Sapi Bibit Unggul			202,50
		- Pengadaan Pejantan Kambing Unggul			27,00
		Program peningkatan Produksi Perkebunan			
		Kegiatan Pengembangan Bibit unggul Pertanian/perkebunan			
		-Kegiatan Pengembangan tanaman karet Rakyat			1.944,00
		-Kegiatan Pengembangan tanaman Jahe Rakyat			480,15
		-Kegiatan Pengembangan tanaman Pala Rakyat			517,50
		-Kegiatan Pengembangan tanaman Lada Rakyat			517,50
		-Kegiatan Pembuatan jalan Usaha tani / Jalan Produksi			5.400,00
		Program peningkatan Produksi Perkebunan			
		-Kegiatan Pembuatan Kebun Percontohan (kakao)			381,27
		Bidang Kehutanan			
		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan			
		- Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan			5.580,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
		-Kegiatan Reboisasi			3.600,00
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan			
		- Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			2.025,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN		Dep. Kelautan dan Perikanan	
		Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana BBI Cubo Bandar Baru			
		Pengaspalan Jalan Masuk BBI			1.950,00
		Penimbunan Komplek BBI			60,00
		Pembangunan Mushalla			112,50
		Pembangunan Pos Jaga Pintu Masuk			40,00
		Pembangunan Gedung Pembuat Pakan Ikan			187,50
		Peralatan Laboratorium			150,00
		Pengadaan Masin Pakan (Pellet)			200,00
		Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana BBU Trienggadeng			
		Pembangunan Mess Karyawan			270,00
		Pembanguna Rumah Pimpinan			187,50
		Pembangunan Ruang Pertemuan			250,00
		Pembangunan Tempat Parkir			150,00
		Pembangunan Paving Blok			100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN			
		Bantuan Agro Input Kerapu			630,00
		Bantuan Agro Input Bandeng			2.920,00
		Rehabilitasi Tambak Rakyat			1.328,00
		Rehabilitasi Saluran Tambak Rakyat (Data Banjir)			22.999,00

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pendederan Kerapu (data Banjir)			255,00
		Rehabilitasi Hatchery (HSRT)			270,00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Tambak :			
		Pembangunan Jembatan Produksi / Saluran Tambak 21 unit			576,00
		Rehabilitasi Saluran Tambak Rakyat (Pasca Banjir) dan Pintu Air			1.656,00
		Pilot Proyek Budidaya Ikan Air Tawar			432,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP			
		Pengembangan Lembaga Usaha Perikanan Tangkap			
		Peningkatan Jalan Komplek PPI Meureudu (aspal hotmix)			1.350,00
		Pembangunan Dermaga TPI Pasi Aron (Multi Year)			765,00
		Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Skala mini			180,00
		Penimbunan Komplek PPI Meureudu			36,00
		Rehabilitasi/Perluasan TPI Meureudu			800,00

MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010
SUMBER DANA OTSUS/MIGAS

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif	
	Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal yang berkualitas	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Pelayanan PAUD yang berkualitas serta kesempatan belajar yang merata	Dinas Pendidikan		
		- Dana Operasional PAUD			375.000.000	
		- Pembangunan TK Bandar Dua			352.800.000	
		- Pembangunan TK Lancok Bandar Baru			352.800.000	
		- Pembangunan TK Jangka Buya			352.800.000	
		- Pembangunan TK Trienggadeng			352.800.000	
		- Pembangunan TK Pante Raja			140.000.000	
		- Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)				
		Program Pendidikan Dasar 9 Tahun				352.200.000
		- Pembangunan pagar SDN Jiem-Jiem B. Baru				89.600.000
		- Pembangunan MCK SDN Mon Sagoe L. Putu				89.600.000
		- Pembangunan MCK SDN Mesjid Trienggadeng				200.000.000
		- Pengadaan Mobiler SD				233.520.000
		- Pembangunan Pagar SDN Pulo Pueb B.Baru				233.520.000
		- Pembangunan Pagar SDN Cubo B.Baru				233.520.000
		- Pembangunan Pagar SDN Blang Sukon				233.520.000
		- Pembangunan Pagar SDN Babah Jurong				233.520.000
		- Pembangunan Pagar SDN 1 Lancok B.Baru				89.600.000
		- Pembangunan MCK SD Negeri Antara Trg				227.960.000
		- Pembangunan Pagar SDN Babah Krueng B.Dua				294.680.000
		- Pembangunan Pagar SDN Ulim Tuenong				216.566.000
		- Pembangunan Pagar SDN Pulo Ulim				199.600.000
		- Pembangunan Pagar SDN Tutue Ara				
	- Pelatihan Pemantapan Kerja Guru Matematika SD 40 Peserta		35.000.000			
	- Pelatihan Pemantapan Kerja Guru IPA Tk; SD 40 Peserta		35.000.000			
	- Pelatihan Pemantapan Kerja Guru IPS Tk; SD 40 Peserta		35.000.000			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		- Pelatihan Pemantapan Kerja Guru Agama Tk SD 40 Peserta			35.000.000
		- Pelatihan Pemantapan Kerja Guru MULOK Tk.SD 40 Peserta			35.000.000
		- Pelatihan pemantapan Guru Matematika SMP 40 Peserta			35.000.000
		- Pelatihan Pemantapan Kerja Guru IPA SMP 80 Peserta			35.000.000
		- Pelatihan pemantapan Kerja Guru IPS SMP 80 Peserta			35.000.000
		- Pelatihan Pemantapan Kerja B.Indonesia SMP 40 Peserta			35.000.000
		- Pelatihan pemantapan Guru B. Inggris 40 peserta			35.000.000
		- Pengadaan Pakaian Seragam sekolah dan perlengkapannya untuk Siswa Miskin dan Yatim Tingkat SD			285.000.000
		- Pengadaan Mobiler SMP			240.000.000
		- Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya			347.500.000
		- Pembangunan Pagar SMP Percontohan			361.400.000
		- Pembangunan Pagar SMP 3 Bandar Dua			389.200.000
		- pembangunan Pagar SMP 2 Bandar Baru			333.600.000
		- Pembangunan Pagar SMP 3 Trienggadeng			
		Program Pendidikan Menengah			1.209.600.000
		- Pembangunan lanjutan SMA Jangka Buya (It.2)			190.000.000
		- Mobiler untuk SMA			278.000.000
		- Pembangunan Pagar MAN Bandar Dua			250.200.000
		- Pembangunan Pagar SMA 1 Bandar Baru			278.000.000
		- Pembangunan Pagar SMA 2 Meureudu			347.500.000
		- pembangunan pagar SMA 2 Bandar Baru			
		- pelatihan Pemantapan Kerja Guru Matematika SMA 40 Peserta			35.000.000
		- Pelatihan pemantapan Guru Fisika SMA Peserta			35.000.000
		- Pelatihan Pemantapan Kerja Guru Kimia SMA Peserta			35.000.000
		- Pelatihan Pemantapan Kerja Guru Biologi SMA Peserta			35.000.000

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		- pelatihan Pemantapan Kerja Guru B.Indonesia SMA 40 Peserta			35.000.000
		- Pelatihan pemantapan kerja Guru B. Inggris SMA 40 Peserta			35.000.000
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
		Uji Kompetensi Tenaga Pendidik Bidang Studi yang di UN kan Tingkat SMA			86.594.000
		Dana Operasioanal Sekolah SMA/MA/SMK			3.058.000.000
		Beasiswa Miskin Prestasi			312.000.000
		Pengadaan Kitab			138.000.000
		Pengadaan Komputer dan Perlengkapan			360.000.000
	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	
		Pembangunan Jalan Nangrhoe-Blang Rheue-Sarah Mane-Lhok Sandeng-Rinyeun Kameng (Lanjutan)			1.800.000.000
		Pembangunan Jalan Blang Awe-Briweueh-Beuracan (Lanjutan)			1.800.000.000
		Pembangunan Jalan Lueng Putu-Blang Krueng-Jiem-Jiem (Lanjutan)			1.800.000.000
		Pembangunan Jalan Trienggadeng-Meureudu-Ulim-Jangkabuya-Samalanga (Lanjutan)			2.877.048.000
		Pembangunan Jalan Pante Raja-Cubo-Jiemjiem (Lanjutan)			1.500.000.000
		Pembangunan Jalan Trienggadeng-Peuduek-Panton Beurasan-Cubo (Lanjutan)			1.800.000.000
		Peningkatan Jalan Uteuen Bayu-Alue Sane-Paya Pisang Klat-Jeulang Barat (Lanjutan)			1.500.000.000
		Peningkatan Jalan Lueng Putu-Pulo Pueb			1.951.333.000
		Pembangunan jembatan			
		Pembangunan Jembatan lancang Paru (5 x 5 m)			400.000.000
		Pengawasan Teknis			
		Pengawasan Teknis Jalan/Jembatan-6 (Pidie Jaya)			433.000.000
		Program Pengembangan Perumahan			
		Pengembangan Rumah Sehat Sederhana			
		Pembangunan Rumah Dhuafa, 26 unit			1.690.000.000
		Program pengembangan sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan			

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pengadaan Tanah untuk Gedung Pengujian Kendaraan dan Terminal Mobil Barang			1.000.000.000
		Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan			1.000.000.000
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi			
		Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lhok Ugob (Ljtn)			500.000.000
		Peningkatan Jaringan Irigasi DI Jangka Buya (Ljtn)			500.000.000
		Program Pengembangan dan Pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung air lainnya			
		Pembuatan Bendung dan Jaringan Irigasi DI Alue Demam (Thp 1)			2.000.000.000
		Perbaikan Berat Jaringan Irigasi DI Lhok Sandeng			893.500.000
		Perbaikan Jaringan Blang Krueng			500.000.000
		Program Pengendalian Banjir			
		Pemasangan Bronjong Tebing Krueng Beuracan			1.000.000.000
	Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat	Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Puskesmas 2 Unit		Dinas Kesehatan	400.000.000
		-Pembangunan Gedung Radiologi			1.324.800.000
		-Pembangunan Gedung Dapur			942.400.000
		-Pembangunan Ruang Poli klinik			950.000.000
		-Pembangunan Kamar Operasi (Operation Teater)			1.407.600.000
		-Pembangunan Rasidental Tipy 65 Rumah Dokter 2 Unit			247.000.000
		-Pembangunan Gedung Unit Gawat Darurat			1.387.000.000
	Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komoditi unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Dinas Pertanian	
		Kegiatan Pengadaan Tanah Bagunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pante Raja			375.000.000
		Kecamatan Jangka Buya			375.000.000
		Kecamatan Ulim			375.000.000


No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN			
		Pembinaan dan Pengembangan Perikanan		Dinas Kelautan	
		Bantuan Agro Input Bandeng			512.000.000
		Bantuan Benih Ikan Air Tawar			60.000.000
		Demplot Budidaya Ikan Air Payau Percontohan (KJA)			400.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP			
		Pengembangan Lembaga Usaha Perikanan Tangkap			
		Rehabilitasi Balai Nelayan 1 unit			30.000.000
		Timbunan Jalan PPI Meuredu			37.740.000
		Pembangunan Balai Nelayan			360.000.000
		Rehabilitasi Dermaga Dayah Pangwa			60.000.000
		Katrol / Keren dan Lori untuk PPI Meuredu			130.000.000
		Jaringan Instalasi Penerangan Komplek / Lampu Komplek PPI (PLN)			110.000.000
		Pengadaan Alat Deteksi Dilaut Multi Guna (Garmen) 178 All in One			100.000.000
		Jaring Trammel Net / Jaring Insang (Udang)			280.000.000
		Tong Fiber besar 10 Unit			160.000.000
		Peralatan Boat Lampu			80.000.000
		Bantuan Penguatan Modal Pedagang Ikan Keliling			60.000.000
		Bantuan Penguatan Modal Pedagang Ikan Pasar			80.000.000
		Bantuan Penguatan Modal Pedagang Kecil di TPI Meuredu			46.000.000
		Pengadaan Perlengkapan alat bengkel			600.000.000
		Pengadaan Jaring Sabu (Udang Rebon) Nelayan Kecil			12.000.000
		Pengadaan Tempat Penjemuran Ikan (Ancak)			75.000.000
		Peralatan Boat Pancing			69.000.000
		Bantuan Perahu Sampan, Jala dan Ancho			50.000.000
		Pengadaan Pukat Pantai			392.000.000
		Pembangunan Pagar Keliling PPI Meuredu			120.000.000
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah		Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk	

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
		Pembangunan Rumah Type 36			
		<i>Gaharu</i>			5.500.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		Pengadaan Mesin RMU			300.000.000
		Modal Kerja Bagi Koperasi Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (kakao)			200.000.000
		Pengembangan Kewira Usaha dan Keunggulan kompetitif UKM			100.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN			
		Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan			240.000.000
		Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang kaki Lima dan Asongan			400.000.000
		Program Peningkatan Pemasaran hasil Peternakan		Dinas Kesehatan Hewan dan Pertenakan	
		Kegiatan Pembibitan dan perawatan Ternak			
		- Pengembangan Bibit Sapi Lokal			350.000.000
		- Pengembangan Bibit Kambing Lokal			80.000.000
		- Pengadaan Kandang Ternak			62.500.000
		- Pembangunan Kandang Kambing			60.000.000
		- Pembuatan kebun rumput HMT			20.000.000
		- Pembangunan Sumur Bor Pos IB Ulim			150.000.000
		Program dan Penanggulangan Penyakit Ternak			
		Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak			
		- Pengadaan Obat-obatan ternak besar			171.939.000
		- Lanjutan pembangunan pasar hewan			600.000.000
		Program Peningkatan Produksi Pertanian		Dinas Pertanian Tanaman Pangan	10.250.000

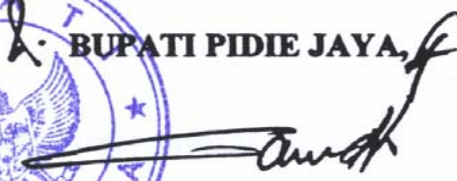
No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian (padi)			36.900.000
		- Pembelian benih sumber			12.300.000
		- Pupuk			595.000.000
		- Pesticida			25.000.000
		- Biaya Oupkup			
		-Biaya Prosesing Benih			
		Program Peningkatan Teknologi Pertanian			810.000.000
		Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana teknologi pertanian			600.000.000
		- Pengadaan Power Tresher multi guna			
		- Pembuatan Lining Saluran Tersier			
		Program Peningkatan Produksi		Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
		Pertanian/Perkebunan			
		Kegiatan Pengembangan Pembangunan Kebun Kakao Rakyat (PO)			1.190.000.000
		- Persiapan lahan, pengadaan Pohon Pelindung dan Biaya pembinaan			380.000.000
		Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan			220.000.000
		- Pembebasan lahan			
		- Pembuatan pagar Kebun			280.000.000
		Kegiatan Pembuatan Jalan Usaha Tani			
		Program Pemanfaatan Potensi Sumber			
		Daya Hutan			
		- Kegiatan Perencanaan dan			
		'Pengembangan Hutan Kemasyaratan			400.000.000
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
		-Kegiatan Rehabilitasi Hutan Pantai			120.000.000

	Penguatan kelembagaan Pemerintah yang berbasis teknologi, Politik dan hukum				
--	--	--	--	--	--

No	Kebijakan Prioritas Pembangunan	Fokus Program Dan Kegiatan	Sasaran	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif
		Pembangunan Lapangan Volly 8 Kecamatan			400000000
		Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah (Tapak Bangunan utk Kepentingan Umum/kantor)			9.000.000.000
		Pengadaan Tanah untuk Tempat Balai latihan Kerja (BLK)			3.000.000.000



BUPATI PIDIE JAYA,



M. GADE SALAM